

**DETERMINAN PENGELUARAN PANGAN 34 PROVINSI DI INDONESIA
PADA MASA PANDEMI COVID-19 MENGGUNAKAN REGRESI
KUANTIL**

Skripsi

Oleh

Rio Yohanes

1911021028



**JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
2025**

ABSTRACT

DETERMINANTS OF FOOD EXPENDITURE IN 34 PROVINCES IN INDONESIA DURING THE COVID-19 PANDEMIC USING QUANTILE REGRESSION

By

RIO YOHANES

This study investigates the primary factors influencing household food expenditure in Indonesia, particularly in the context of the economic impacts of the Covid-19 pandemic, rising food insecurity (Prevalence of Undernourishment/PoU), and persistent income inequality (Gini Index). The research aims to analyze the influence of Provincial Minimum Wage (UMP), Gini Index, Food Insecurity Prevalence (PKP), and Non-Food Expenditure (PNM) on household food expenditure. Employing a quantitative approach with Quantile Regression, the study examines these relationships across various distribution points. The findings reveal that UMP negatively and significantly affects food expenditure at the 25th and 50th percentiles, while the Gini Index shows a positive and significant influence at the same quantiles. Furthermore, PKP negatively and significantly impacts food expenditure at the 75th and 85th percentiles. Conversely, PNM consistently exhibits a positive and significant relationship with food expenditure across all analyzed quantiles (25th, 50th, 75th, and 85th). These results offer valuable insights for policymakers in developing targeted strategies to enhance food security and promote economic well-being in Indonesia.

Keywords: Covid-19, Food Expenditure, Food Insecurity, Income Inequality, Quantile Regression

ABSTRAK

DETERMINAN PENGELUARAN PANGAN 34 PROVINSI DI INDONESIA PADA MASA PANDEMI COVID-19 MENGGUNAKAN REGRESI KUANTIL

Oleh

RIO YOHANES

Studi ini menyelidiki faktor-faktor utama yang mempengaruhi pengeluaran makanan rumah tangga di Indonesia, terutama dalam konteks dampak ekonomi dari pandemi Covid-19, meningkatnya ketahanan pangan (Prevalensi Kekurangan Gizi/PoU), dan ketidaksetaraan pendapatan yang persisten (Indeks Gini). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP), Indeks Gini, Prevalensi Ketahanan Pangan (PKP), dan Pengeluaran Non-Pangan (PNM) terhadap pengeluaran makanan rumah tangga. Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan Regresi Kuantile, penelitian ini menguji hubungan-hubungan ini di berbagai titik distribusi. Temuan menunjukkan bahwa UMP berdampak negatif dan signifikan terhadap pengeluaran makanan pada persentil ke-25 dan ke-50, sementara Indeks Gini menunjukkan pengaruh positif dan signifikan pada kuantile yang sama. Selanjutnya, PKP berdampak negatif dan signifikan terhadap pengeluaran makanan pada persentil ke-75 dan ke-85. Sebaliknya, PNM secara konsisten menunjukkan hubungan positif dan signifikan dengan pengeluaran pangan di seluruh kuantil yang dianalisis (25, 50, 75, dan 85). Hasil ini memberikan wawasan berharga bagi pengambil keputusan dalam mengembangkan strategi yang ditargetkan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan mempromosikan kesejahteraan ekonomi di Indonesia.

Kata Kunci: Covid-19, Pengeluaran Pangan, Ketahanan Pangan, Ketimpangan Pendapatan, Regresi Kuantil

**DETERMINAN PENGELUARAN PANGAN 34 PROVINSI DI INDONESIA
PADA MASA PANDEMI COVID-19 MENGGUNAKAN REGRESI
KUANTIL**

Oleh

RIO YOHANES

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

SARJANA EKONOMI

Pada

Jurusan Ekonomi Pembangunan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

**: DETERMINAN PENGELUARAN 34 PROVINSI
DI INDONESIA PADA MASA COVID-19
MENGGUNAKAN REGRESI KUANTIL.**

Nama Mahasiswa

: Rio Yohanes

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1911021028

Program Studi

: S1- Ekonomi Pembangunan

Jurusan

: Ekonomi Pembangunan

Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis



1. Komisi Pembimbing

Dr. Asih Murwiati, S.E., M.E.
NIP. 19704102008122001

2. Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

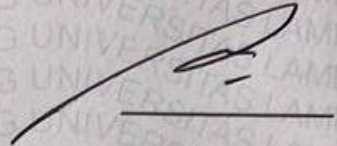
Dr. Arivina Ratih Y.T, S.E., M.M.
NIP 19800705006042002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

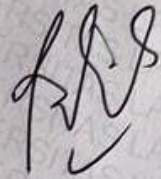
Ketua

: Dr. Asih Murwiati, S.E., M.E.



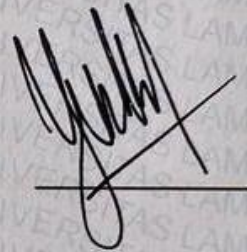
Penguji I

: Dr. Arivina Ratih Y.T., S.E., M.M.



Penguji II

: Prayudha Ananta, S.E., M.Si.



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si
NIP. 196606211990031003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 8 Agustus 2025

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rio Yohanes

NPM : 1911021028

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang terjadi "**Determinan Pengeluaran Pangan 34 Provinsi di Indonesia Pada Masa Covid-19 Menggunakan Regresi Kuantil**" adalah hasil karya saya sendiri, dan dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan dari orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat pemikiran dari peneliti lain tanpa pengakuan peneliti aslinya . Apabila terdapat hal tersebut, baik sengaja maupun tidak, sepenuhnya tanggung jawab ada pada penulis.

Bandar Lampung, 8 Agustus 2025

Yang memberi Pernyataan,



Rio Yohanes

NPM. 1911020128

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Rio Yohanes, peneliti dilahirkan di Jakarta Pusat, Kota Jakarta, provinsi DKI Jakarta pada tanggal 1 Juli tahun 2000. Penulis merupakan anak kedua dari bapak H. Aritonang dan ibu Ernawati Marbun.

Penulis menyelesaikan Taman Kanak-Kanak (TK) di TK Harapan Jaya pada tahun 2006, Sekolah Dasar (SD) di SD Travina Prima pada tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 21 Bekasi pada tahun 2015, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA 10 Bekasi pada tahun 2018. Pada tahun 2019 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung jurusan S1 Ekonomi Pembangunan melalui Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2019. Pada tahun 2020 penulis mengikuti kegiatan organisasi Unit Kegiatan Mahasiswa Kristen (UKMK) sebagai anggota divisi 2 yaitu bidang Hubungan Masyarakat. Selanjutnya penulis melakukan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Pusaka Rakyat, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat.

MOTTO

Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah
dalam doa

(Roma 12:12)

Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di
dalam Yesus Kristus bagi kamu

(Efesus 4:2)

Jangan biarkan ketakutan mengendalikan hidupmu, tetapi jadikanlah keberanian
sebagai pemandu dirimu untuk melangkah maju”

(Rio Yohanes)

”In the name of Jesus Christ”

Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan
nikmat yang diberikan

saya persembahkan karya terbaik ini :

Untuk keluargaku yang tiada henti-hentinya mendoakan kesuksesanku dan
keberhasilanku sehingga aku bisa berada di titik yang sekarang ini.

Untuk Orang Tua, Ibu Ernawati dan Ayah H.Aritonang.

Untuk kekeluargaan & kebersamaan, sahabat – sahabat seperjuangan ku, Untuk
seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Ekonomi Pembangunan atas

motivasi, bimbingan, pelajaran, pengalaman dan nasihat. Serta Almamater

Tercinta.

SANWACANA

Shallom,salam Sejahtera untuk kita semua

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena berkat limpahan kasih dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Determinan Pengeluaran Pangan 34 Provinsi di Indonesia Pada Masa Covid-19 Menggunakan Regresi Kauantil” yang merupakan salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi Pembangunan di Universitas Lampung. Di dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis mendapatkan bimbingan dan arahan dari berbagai pihak sehingga membantu proses penyelesaian skripsi ini. Oleh karenanya, pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
2. Ibu Dr.Arivina Ratih, Y.T. S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
3. Ibu Zulfa Emalia, S.E., M.Sc. selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
4. Ibu Dr.Asih Murwiati, S.E., M.E. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan saran,kritik,masukan serta pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
5. Bapak Imam Awaluddin, S.E., M.E. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi arahan serta masukan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
6. Ibu Dr.Arivina Ratih, Y.T, S.E., M.M. selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan arahan serta masukan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

7. Bapak Prayudha Ananta, S.E., M.Si selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan arahan serta masukan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
8. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan wawasan yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
9. Seluruh Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan.
10. Orang Tuaku, Bapak, Mama, yang telah merawat, membimbing, mendidik, menyayangi, mendoakan, memotivasi, dan yang tiada lelah-lelahnya memberikan kasih sayang kepada penulis. Mendukung ku secara moral maupun materi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
11. Kakak, Adek yang selalu memberikan dukungan moral, arahan serta masukan bagi penulis selama menyelesaikan studi
12. Keluarga Nangboru di Bandar Lampung yang telah membimbing, dan mendidik penulis selama singgah di rumah mereka
13. Kawan seperjuangan "Kowalski" Ricky, Puja, Hans, Depa, Hito, Adji, Aris, Devis, Bimo, Jaka , yang selalu ada bersama penulis sejak masa - masa perkuliahan, terimakasih telah mewarnai masa perkuliahan dan selalu memberikan keceriaan dan semangat untuk penulis.
14. Teman-teman Ekonomi Pembangunan Angkatan 2019 yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah berjuang bersama-sama di Ekonomi Pembangunan dari awal perkuliahan hingga saat ini.
15. Adik-Adik tingkat penulis angkatan 2022 Febby, Onya, Angel, Saskia, Naura, Intan, Daniel, Harry yang selalu menemani dan memberikan semangat di setiap situasi dan kondisi yang ada.
16. Teman-Teman satu organisasi Evelyn, Dea, Novita, Andi, Sarah, Era, Kenny yang selalu memberikan keceriaan dan dukungan bagi penulis.
17. Teman-Teman seluruh anggota UKM Kristen Universitas Lampung yang tidak bisa disebutkan namanya satu-persatu yang telah memberikan warna baru dan selalu memberikan dukungan terhadap penulis

18. Teman sepermainan "Persekutuan Duniawi" Leo, Bram, Ruben, Rafael, Lantipan, Richardo, Nico Dll yang selalu menemani hari-hari penulis dan memberi keceriaan di setiap pertemuan
19. Sahabat-Sahabat "Kelwang" Evan, Dennis, Nando, Sisti, Anggita, Rendy, yang selalu menghibur dan mendukung penulis.
20. Teman-Teman "Kos Putra 45" Jepang, Nael, Ruben, Josh, Michael, Matthew, Rey, Daniel yang selalu menemani dan mendukung penulis selama hidup di kos.

Bandar Lampung, Agustus 2025
Penulis

(Rio Yohanes)

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
 I. PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Manfaat Penelitian	14
 II. TINJAUAN PUSTAKA	 15
2.1 Landasan Teori	15
2.1.1 Teori Konsumsi	15
2.1.2 Ketimpangan Pendapatan	16
2.1.3 Ketahanan Pangan	20
2.1.4 Teori Upah	21
2.1.5 Regresi Kuantil	23
2.2 Peneliti Terdahulu	25
2.3 Kerangka pemikiran	29
2.4 Hipotesis Penelitian	29
 BAB III METODE PENELITIAN	 30
3.1 Jenis penelitian	30
3.2 Waktu dan tempat penelitian	30
3.3 Jenis dan sumber data	30
3.4 Definisi Operasional Variabel	31

3.5 Populasi dan sampel penelitian	32
3.6. Metode Analisis Data	32
3.7 Metode Analisis OLS	33
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	39
4.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	39
4.1.1 Pengeluaran Pangan.....	39
4.1.2 Prevalensi Ketidakcukupan Pangan.....	40
4.1.3 Indeks Gini.....	40
4.1.4 Upah Minimum Provinsi	40
4.1.5 Pengeluaran Non Makanan.....	41
4.2 Pengujian Asumsi Klasik.....	41
4.2.1 Uji Normalitas	41
4.2.2 Uji Heteroskedastisitas.....	41
4.2.3 Uji Multikolonieritas	42
4.3 Hasil Estimasi Regresi.....	43
4.4 Pengujian Hipotesis.....	43
4.4.1 Uji Partial (Uji T-Statistik).....	43
4.5 Pembahasan Hasil Penelitian.....	45
4.5.1. Pengaruh Prevalensi Ketidakcukupan Pangan terhadap Pengeluaran Pangan pada provinsi di Indonesia.	46
4.5.2 Pengaruh Indeks Gini terhadap Pengeluaran Pangan pada Provinsi di Indonesia.....	47
4.5.3 Pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap Pengeluaran Pangan	48
4.5.4 Pengaruh Pengeluaran Non Makanan terhadap Pengeluaran Pangan pada provinsi di Indonesia.....	49
4.6 Regresi Kuantil.....	50
4.7 Interpretasi Model Regresi Kuantil	52
4.7.1 Interpretasi dari model regresi kuantil $\tau = 0,25$:	52
4.7.2 Interpretasi dari model regresi kuantil $\tau = 0,50$:	53
4.7.3 Interpretasi dari model regresi kuantil $\tau = 0,75$:	53
4.7.4 Interpretasi dari model regresi kuantil $\tau = 0,85$:	54

V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	56
5.1 Kesimpulan.....	56
5.2 Saran.....	57
 DAFTAR PUSTAKA.....	 58
LAMPIRAN.....	61

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	25
Tabel 3.1 Variabel, Simbol, Satuan dan Sumber Data	30
Tabel 4.1 Hasil Analisis Deskriptif	39
Tabel 4.2 Hasil Uji Skewness/Kurtosis Normalitas	41
Tabel 4.3 Hasil Uji Heterokedastisitas Metode Breusch Pagan	42
Tabel 4.4. Hasil Uji Multikolonieritas Metode Variance Inflation Factor (VIF)	42
Tabel 4.5 Hasil Estimasi Data Cross Section	43
Tabel 4.6 Hasil Estimasi T-Statistik	43
Tabel 4.7 Hasil Uji T-Statistik Variabel Prevalensi Ketidakcukupan Pangan	44
Tabel 4.8 Hasil Uji T-Statistik Variabel Indeks Gini.....	44
Tabel 4.9 Hasil Uji T-Statistik Variabel Upah Minimum Provinsi.....	45
Tabel 4.10 Hasil Uji T-Statistik Variabel Pengeluaran Non Makanan	45
Tabel 4.11 Hasil Kuantil Menjadi 4 Bagian	50
Tabel 4.12 Penduga Parameter Regresi Kuantil.....	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1.1 Pengeluaran Pangan 34 Provinsi di Indoensia Tahun 2020	5
Gambar 1.2 Prevelensi Ketdiakcukupan Pangan di 34 Provinsi di Indonesia tahun 2020	6
Gambar 1.3 Prevelensi ketidakcukupan pangan di negara ASEAN tahun 2020 ..	7
Gambar 1.4 Nilai Koefisien Gini per Provinsi 2019-2021	10
Gambar 1.5 Pengeluaran Non Makanan 34 provinsi di Indonesia tahun 2020.....	11
Gambar 1.6 Upah Minimum Provinsi di Indonesia tahun 2020	12
Gambar 2.1.Kurva Lorenz.....	19

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi Covid-19 yang melanda pada awal tahun 2020 telah memberikan dampak serius terhadap perekonomian Indonesia, mengakibatkan deflasi atau penurunan drastis akibat ketidakstabilan ekonomi. Adanya peraturan tentang Pembatasan Sosial Berskala besar (PSBB) menyebabkan Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar -5,32% pada kuartal II-2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya (yoy). Hingga kuartal I-2021, perekonomian Indonesia terus mengalami kontraksi.

Pemerintah terus berupaya menerapkan kebijakan dengan harapan dapat mengurangi dampak negatif pada perekonomian Indonesia yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Pada kuartal II-2021, laju pertumbuhan perekonomian Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan hingga 7,08% (yoy). Secara kumulatif, ekonomi Indonesia tahun 2021 tumbuh sebesar 3,69% lebih baik dibandingkan 2020 yang mengalami kontraksi sebesar -2,07%. Sepanjang tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh solid diangka 5,3% secara kumulatif dan selalu berada di atas 5% pada tiap kuartalnya, hal ini didukung oleh efektivitas kebijakan penanganan pandemi Covid-19 dan inflasi yang terkendali.

Di tengah berbagai tantangan ekonomi global, pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2023 mampu mencapai 5,05%. Pada kuartal IV-2023 pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,04% (yoy), lebih tinggi dari kuartal III-2023 yang tumbuh sebesar 4,94%. Meskipun pandemi Covid-19 masih memberikan tantangan, tetapi upaya keras dan kebijakan yang tepat telah membawa Indonesia menuju arah pemulihan ekonomi yang lebih baik. Diharapkan, momentum positif ini dapat terus

dipertahankan dan diperkuat guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam beberapa tahun mendatang.

Agenda pembangunan internasional secara aktif dipimpin oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan badan-badan teknis serta pendanaannya sejak awal berdirinya pada akhir tahun 1940-an. Hingga tahun 1990-an, pendekatan ini terfragmentasi dan terputus putus yang diprakarsai oleh badan-badan khusus atau dana di berbagai KTT dan Konferensi Dunia untuk menangani tiga dimensi Pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Deklarasi Milenium dan Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) menunjukkan konvergensi agenda pembangunan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP); Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP); Organisasi Kesehatan Dunia (WHO); Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF); Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO); dan lembaga pembangunan lainnya. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang baru-baru ini diadopsi mencerminkan penguatan konvergensi agenda pembangunan. SDGs juga memperkuat kesetaraan, hak asasi manusia, dan nondiskriminasi. (Lingkungan dkk., 2016)

Bebas dari kelaparan merupakan salah satu prioritas global yang tertuang dalam tujuan kedua Sustainable Development Goals (SDG's) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Implementasi dari tujuan ini diwujudkan melalui berbagai langkah strategis seperti mengakhiri kelaparan, memperbaiki nutrisi, dan mencapai ketahanan pangan. Target yang diharapkan tercapai pada tahun 2030 adalah menghilangkan kelaparan dengan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun. Di Indonesia, tujuan ini direalisasikan dalam prioritas pembangunan Indonesia yang tertuang dalam prioritas ketahanan pangan.

Di antara 17 tujuan SDGs, tujuan ke-2 SDGs adalah Tanpa Kelaparan (*Zero Hunger*). Inti dari tujuan ini adalah untuk menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan (BAPPENAS, 2017). Salah satu indikator yang menjadi tolak ukur ketercapaian tujuan tersebut adalah prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau *Prevalence of Undernourishment* (PoU). Ketidakcukupan konsumsi pangan (*undernourishment*) didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang, secara regular, mengonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif, dan sehat (FAO, 2021).

Dalam metadata indikator yang ada pada situs web Badan Pusat Statistik (BPS), dijelaskan bahwa PoU adalah estimasi proporsi dari suatu populasi tertentu, dimana konsumsi energi biasanya sehari-hari dari makanan tidak cukup untuk memenuhi tingkat energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif dan sehat, yang dinyatakan dalam bentuk persentase.

Prevalance of Undernourishment (PoU) dihitung sebagai persentase populasi yang konsumsinya di bawah *Minimum Dietary Energy Requirement* (MDER). MDER populasi digunakan sebagai proksi ambang batas (*threshold*) dan dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang dari persyaratan energi minimum untuk setiap kelompok usia dan jenis kelamin dalam populasi (Wanner et al., 2014). Secara global, PoU mengalami peningkatan sebesar 9,2 hingga 10,4 persen pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 (FAO et al., 2021). Sementara itu, persentase penduduk dengan ketidakcukupan konsumsi pangan (PoU) di Indonesia mengalami peningkatan pada tahun 2020 (8,34 persen) dibandingkan tahun 2019 (7,63 persen) (PUSDATIN-KEMANTAN, 2021).

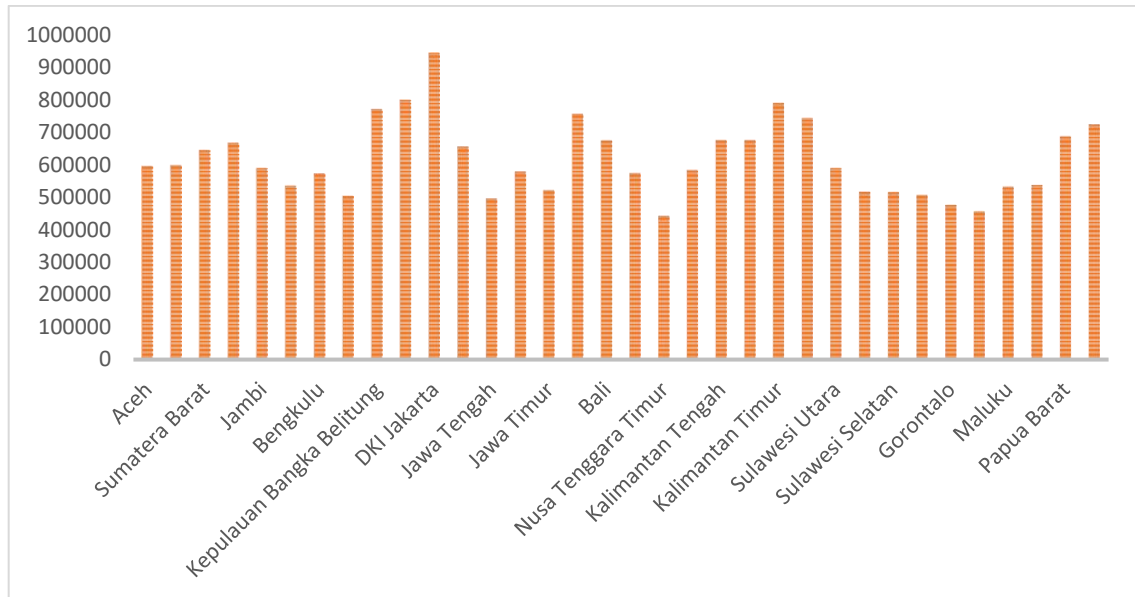
Terlebih lagi, berdasarkan data yang dirilis pada situs web BPS, peningkatan nilai PoU di Indonesia pada tahun 2020 ini merupakan peningkatan terbesar selama periode 2017-2021. Peningkatan ini tentunya menjadi tantangan global termasuk bagi Indonesia dalam mencapai tujuan SDGs yang ke-2 yaitu Tanpa Kelaparan pada tahun 2030.

Pangsa pengeluaran pangan yang menggambarkan proporsi pengeluaran yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan merupakan salah satu indikator ketahanan pangan yang akan mencerminkan kesejahteraan. Jika dibandingkan Maret 2017, pangsa pengeluaran pangan mengalami penurunan yang mengindikasikan adanya peningkatan kesejahteraan. Pangsa pengeluaran pangan penduduk di perdesaan (56,28 persen) masih lebih besar dibandingkan penduduk diperkotaan (45,98 persen).

Pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup dan terjangkau oleh seluruh penduduk dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan telah menjadi salah satu tujuan utama pembangunan nasional. Ketahanan pangan merupakan salah satu isu sentral dalam kerangka pembangunan nasional dan salah satu fokus kebijakan operasional pembangunan pertanian. Dalam mewujudkan pembangunan ketahanan pangan nasional di era globalisasi dan desentralisasi di masa mendatang perlu diperhatikan berbagai perkembangan yang terjadi selama ini.

Salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan program ketahanan pangan melalui kondisi/situasi konsumsi pangan masyarakat dilakukan analisis situasi konsumsi pangan, karena situasi konsumsi pangan dapat menggambarkan akses masyarakat terhadap pangan, status gizi dan kesejahteraannya, yang dinyatakan dalam nilai skor mutu pangan atau skor Pola Pangan Harapan (PPH).

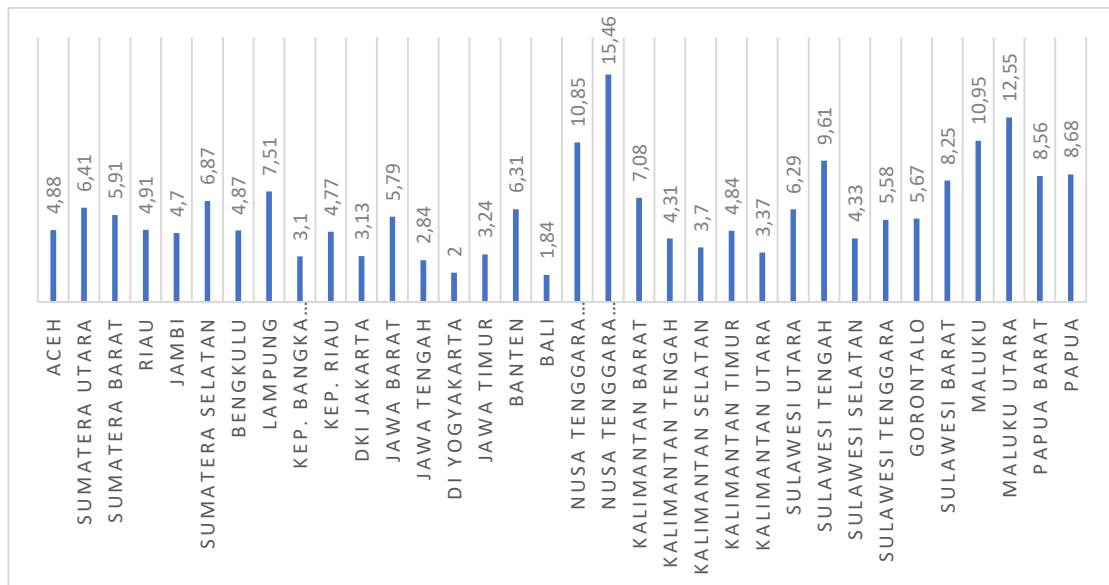
Konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman pada tahun 2015 – 2019 dapat terwujud apabila perencanaan penyediaan pangan ke depan mengacu pada peningkatan kemampuan produksi, permintaan pangan (daya beli dan preferensi konsumen) dan pendekatan pemenuhan kebutuhan gizi seimbang yang didukung oleh pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat. Sejalan dengan amanat UU No.17/2007 tentang RPJPN 2005-2025 serta UU No. 18/2012 tentang Pangan, bahwa arah kebijakan umum ketahanan pangan dalam RPJMN 2015-2019 perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat dapat dilakukan melalui peningkatan pola konsumsi pangan masyarakat yang berbasis sumberdaya dan budaya lokal.



Gambar 1.1 Pengeluaran pangan menurut provinsi di Indonesia tahun 2020
Sumber : Badan Pusat Statistik , data diolah tahun 2020

Berdasarkan pada Gambar 1.1, Provinsi dengan pengeluaran untuk pangan terbesar yaitu di provinsi DKI Jakarta sebesar Rp.9.446.870 diikuti provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp.8.004.243 pada tahun 2020. Sedangkan provinsi dengan pengeluaran pangan terendah yaitu provinsi Rp.4.427.000 diikuti provinsi Jawa Tengah sebesar 4.961.730 .

Provinsi yang berada di pulau jawa relatif memiliki pengeluaran untuk pangan yang tinggi dibanding dengan provinsi yang berada di pulau jawa. Ini sejalan juga dengan masyarakat di daerah pulau jawa memiliki tingkat pendapatan yang cenderung lebih tinggi dibanding masyarakat yang berada di luar jawa, sejalan juga dengan meningkatnya kebutuhan akan pangan yang terus dan harus di cukupkan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari hari.

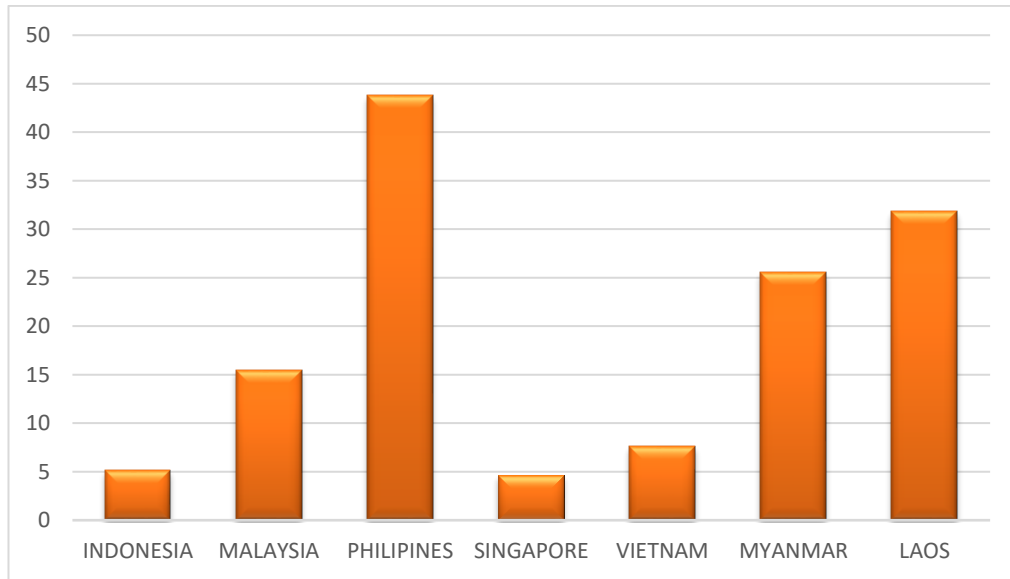


Gambar 1.2. Prevelensi Ketdiakcukupan Pangan di 34 Provinsi di Indonesia tahun 2020
Sumber : Badan Pusat Statistik, data diolah 2020

Gambar 1.2 menggambarkan bahwa provinsi dengan persentase kerawanan pangan tertinggi yaitu di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan persentase kerawanan pangan 15,46% pada tahun 2020, diikuti dengan provinsi Maluku Utara dengan presentase ketidakcukupan pangan sebesar 12,55%. Sedangkan provinsi dengan persentase ketidakcukupan pangan terendah yaitu provinsi Bali 1,84%, diikuti provinsi DI Yogyakarta 2% .

Gambar 1.2 menggambarkan adanya ketimpangan dalam kerawanan konsumsi pangan antara provinsi yang ada di pulau jawa dengan provinsi yang ada di luar jawa, masyarakat yang ada di pulau jawa memiliki kemampuan dan kecukupan untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka dengan di ikuti oleh pendapatan masyarakat pulau jawa yang sudah mencukupi untuk mereka memenuhi kebutuhan pangan ketimbang masyarakat di luar pulau jawa

Identifikasi kondisi kerawanan pangan rumah tangga dapat mencegah dampak jangka panjang masalah kesehatan yaitu kekurangan gizi pada masyarakat (Kementerian PPN/Bappenas, 2020). Kerawanan pangan termasuk penyebab utama masalah gizi (DKP et al., 2009). Provinsi NTT tercatat sebagai provinsi dengan masalah gizi yang berstatus kronis-akut (Kemenkes, 2021).



Gambar 1.3. Prevelensi ketidacukupan pangan di negara ASEAN tahun 2020
Sumber : Worldbank , data diolah 2020

Berdasarkan gambar 1.3, menggambarkan bahwa negara Filipina memiliki persentase kerawanan pangan tertinggi yaitu sebesar 43,8% di tahun 2020. Sedangkan negara Singapura memiliki persentase ketidacukupan pangan terendah yaitu 4,6 % di tahun 2020. Hal ini menunjukkan dalam konteks kerawanan pangan Indonesia tidak memiliki kerawanan pangan yang begitu berarti dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Ada beberapa faktor yang membuat masyarakat Indonesia masih memiliki kemampuan dan kecukupan dalam pengeluaran pangan ialah Indonesia masih memiliki ketersediaan pangan yang bisa di gunakan oleh masyarakat dan masyarakat sendiri masih mampu dan bisa memanfaatkan ketersediaan pangan untuk mereka konsumsi sehari hari dan bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri sehingga dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia itu sendiri.

Salah satu dimensi yang penting dalam ketahanan pangan adalah akses berkelanjutan ke makanan yang cukup. Untuk mengetahui akan hal ini, maka *Food and Agriculture Organization* (FAO) mengeluarkan *Food Insecurity Experience Scale* (FIES) yang berupa kumpulan dari delapan pertanyaan yang menanyakan terkait pengalaman kerawanan pangan setiap rumah tangga. Jawaban dari delapan pertanyaan ini selanjutnya diolah dengan menggunakan Model Rasch untuk melihat

seberapa valid pertanyaan-pertanyaan tersebut dalam menggambarkan pengalaman kerawanan pangan rumah tangga. Dalam penelitiannya tentang kerawanan pangan yang dilakukan oleh Herlina et al.(2020) menyebutkan bahwa model Rasch yang dipakai untuk menganalisis FIES ini mempunyai keterbatasan dalam melihat lebih jauh variabel-variabel sosial ekonomi yang sekiranya mempunyai keterkaitan dengan kerawanan pangan pada tingkat rumah tangga.

Kerawanan pangan merupakan kondisi terbalik dari ketahanan pangan. Menurut Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 Tahun 2022, kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakmampuan wilayah sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tidak tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Kerawanan pangan berhubungan erat dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs), terutama pada tujuan 2 yaitu *Zero Hunger* atau Nol Kelaparan. Target dari tujuan 2 SDGs ini adalah untuk mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan, meningkatkan produktivitas pertanian, dan memastikan akses pangan yang aman dan bergizi bagi semua orang.

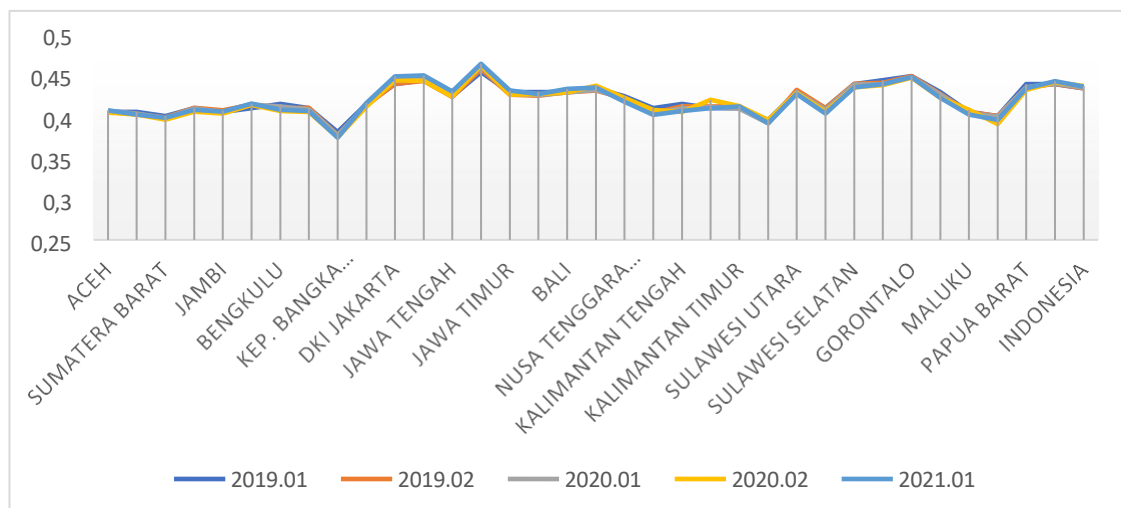
Indonesia sebagai salah satu negara anggota PBB, berkomitmen untuk menerapkan SDGs. Substansi dan tujuan dari SDGs telah diselaraskan dengan “Nawacita” sebagai visi pembangunan nasional Indonesia, yang terintegrasi dalam kebijakan pembangunan, strategi dan program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dan diterjemahkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Selain itu, SDGs pun diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan di tingkat subnasional melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) (Bappenas, 2017).

Ketahanan pangan rumah tangga berhubungan dengan kemampuan rumah tangga dalam mengakses pangan secara cukup untuk memenuhi dicerminkan oleh beberapa indikator, antara lain: tingkat kerusakan tanaman, ternak dan

perikanan, penurunan produksi pangan, tingkat ketersediaan pangan di rumah tangga, proporsi pengeluaran pangan terhadap pengeluaran total, fluktuasi harga pangan utama yang umum dikonsumsi rumah tangga, perubahan kehidupan sosial, seperti migrasi, menjual/menggadaikan aset, keadaan konsumsi pangan berupa kebiasaan makan, kuantitas dan kualitas pangan, dan status gizi (Saliem & Ariani, 2016).

Secara global, angka ketidakcukupan konsumsi pangan mengalami kenaikan yang cukup tinggi dari 8,0% pada tahun 2019 menjadi 9,3% pada tahun 2020 dan berlanjut naik secara perlahan menjadi sekitar 9,8% pada tahun 2021 (FAO, 2022). Lebih dari setengah masalah ketidakcukupan konsumsi pangan terjadi di Benua Asia atau sekitar 418 juta orang sedangkan lebih dari sepertiganya berada di Afrika (282 juta orang). Jika dibandingkan dengan angka pada tahun sebelumnya, pada tahun 2020 terdapat lebih dari 57 juta penambahan jumlah ketidakcukupan konsumsi pangan (FAO, 2021). Di Indonesia, angka ketidakcukupan konsumsi pangan mengalami peningkatan dari tahun 2020 (8,34%) naik secara perlahan pada tahun 2021 pada angka 8,49%. Peningkatan yang cukup tinggi terjadi pada tahun 2022 dengan PoU sebesar 10,21% atau terjadi kenaikan sekitar 20,26% dari tahun sebelumnya.

Semakin tinggi angka *Prevalance of Undernourishment* (PoU) menunjukkan semakin banyak pula penduduk yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan. Ditinjau secara regional, tiga provinsi dengan angka PoU tertinggi berada di wilayah timur Indonesia, yaitu Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Provinsi Papua memiliki angka PoU sebesar 36.18% yang artinya sebanyak 36.18% dari 4.420.740 jiwa atau lebih dari 1.5 juta jiwa mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan. Sementara itu, provinsi dengan angka PoU terendah adalah Nusa Tenggara Barat (NTB) pada angka 2.24% atau hanya sekitar 122 ribu jiwa penduduk yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan (BPS, 2022).

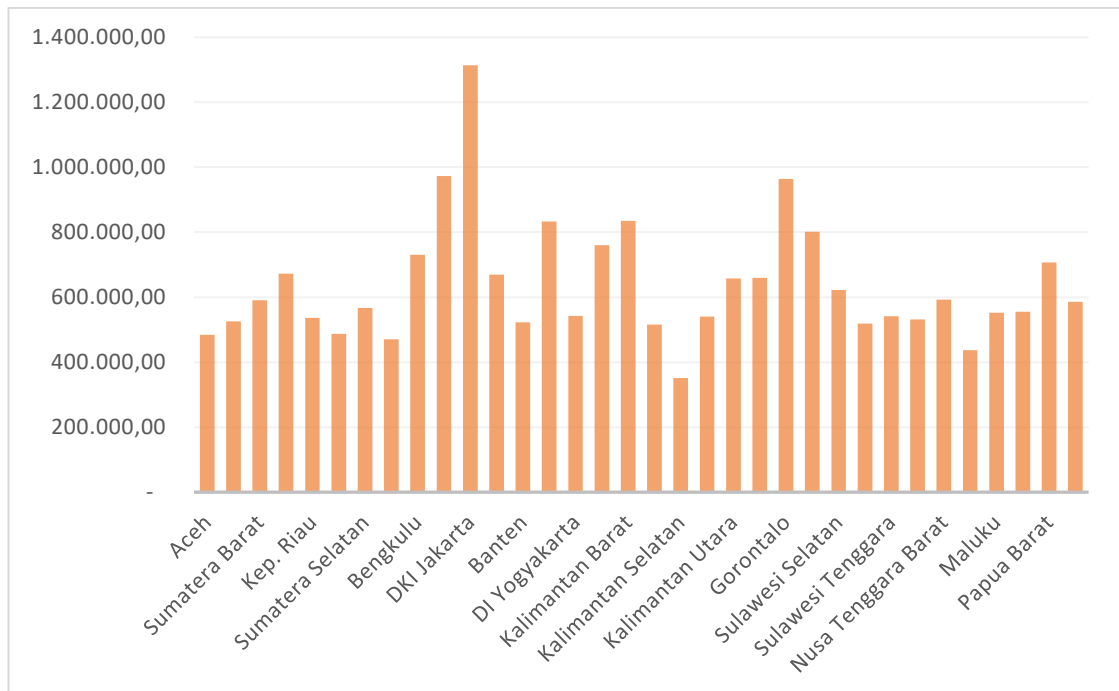


Gambar 1.4. Nilai Koefisien Gini per Provinsi 2019-2021

Sumber : Badan Pusat Statistik 2019-2021

Gambar 1.4 menunjukkan nilai koefisien Gini dari 2019 semester pertama hingga 2021 semester pertama. Secara grafis dapat dilihat bahwa semua provinsi yang ada di pulau Jawa dan sebagian provinsi di pulau Sulawesi memiliki nilai yang cenderung lebih tinggi daripada daerah lain. Nilai koefisien Gini tertinggi dalam 5 periode terakhir ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang selalu berada di atas 0,42. Nilai koefisien Gini terendah ada di Provinsi Bangka Belitung dengan yang selalu berada di bawah 0,28.

Dalam grafik terlihat wilayah timur Indonesia, khususnya Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua memiliki nilai koefisien yang cenderung rendah dibandingkan provinsi-provinsi lain, bahkan lebih rendah dari nilai koefisien nasional. Rendahnya nilai tersebut memang dimaknai bahwa tingkat ketimpangannya rendah.



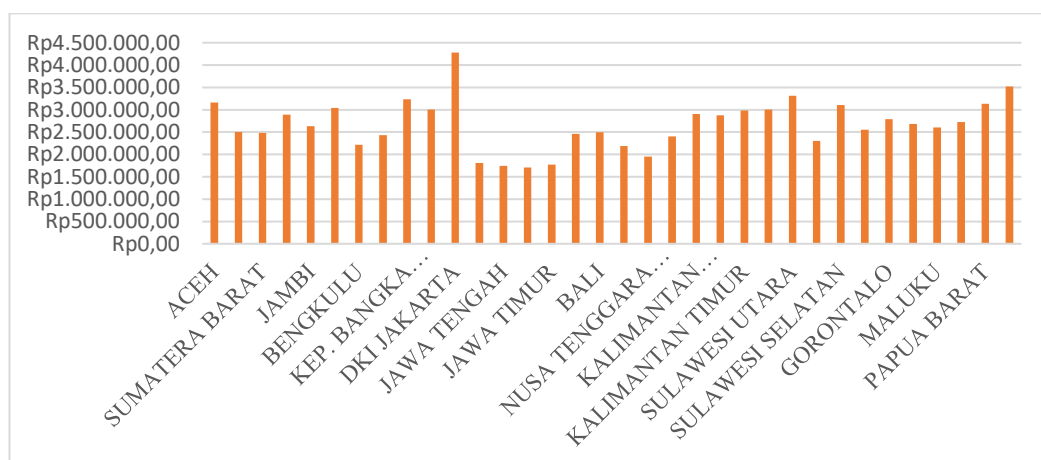
Gambar 1.5. Pengeluaran non makanan 34 provinsi di Indonesia tahun 2020
Sumber : Badan Pusat Statistik, data diolah 2020

Gambar 1.5 menunjukkan bahwa jumlah Pengeluaran Non Makanan terbesar 34 provinsi di Indonesia tahun 2020 terbesar ada pada provinsi DKI Jakarta sebesar Rp.1.313.304,39 , sedangkan provinsi dengan jumlah Pengeluaran Non Makanan terendah adalah Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp. 351.611,11 pada tahun 2020

Gambar 1.5 menunjukkan jumlah Pengeluaran Non Makanan per provinsi di Indonesia tahun 2020 .Provinsi dengan Pengeluaran Non Makanan tertinggi di dominasi oleh provinsi Indonesia wilayah Pulau Jawa meliputi DKI Jakarta,Jawa Barat,Jawa Timur dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pada pola konsumsi di berbagai provinsi di Indonesia dalam hal mengkonsumsi hal-hal lain selain makanan. Dimana pengeluaran selain makanan biasanya akan di alokasikan rumah tangga untuk Pendidikan,kebutuhan rumah tangga mencakup kebutuhan rumah,kesehatan,kebutuhan per individu hingga memenuhi kebutuhan hiburan misalnya keperluan untuk pergi liburan, membeli barang pribadi dan lain-lain.

Masyarakat berpendapatan rendah akan mengalokasikan pendapatannya sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan dibandingkan bahan non-pangan, semakin tinggi pengeluaran non-makanan mengindikasikan adanya perbaikan kesejahteraan penduduk (Hardjana, 1994), Hasil penelitian Sari Novita dan Fardianah Mukhyar (2011), Rachman dan Wahida (1998), Suryana dkk. (1988) menyatakan bahwa komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran guna menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, semakin rendah persentase pengeluaran untuk pangan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat perekonomian penduduk.

Sebaliknya, semakin besar pangsa pengeluaran pangan semakin kurang sejahtera rumahtangga yang bersangkutan Dalam kondisi pendapatan terbatas maka pemenuhan kebutuhan makanan akan didahulukan, sehingga pada kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah akan terlihat sebagian besar pendapatan mereka digunakan untuk membeli pangan (Sukirno 2000).



Gambar 1.6. Upah Minimum Provinsi di Indonesia tahun 2020

Sumber : Badan Pusat Statistik, data diolah 2020

Gambar 1.6 menjelaskan bahwa Jumlah Upah Minimum Provinsi tertinggi yaitu provinsi DKI Jakarta sebesar Rp.4.276.350,00 pada tahun 2020. Sementara jumlah Upah Minimum Provinsi terendah yaitu provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.1.704.608,00 pada tahun 2020.

Upah minimum provinsi merupakan upah yang berlaku diseluruh kabupaten/kota dalam satu provinsi maka dari itu provinsi yang memiliki nilai upah tinggi dapat menjadikan faktor penarik seseorang ingin melakukan migrasi sebab dengan upah yang tinggi akan menurunkan penyerapan tenaga kerja di daerah kota hingga 5 persen (Santoso et al., 2018). Umumnya seseorang yang akan bermigrasi pasti membandingkan terlebih dahulu penghasilan yang mereka terima di daerah asal dengan penghasilan yang nantinya akan diterima di daerah tujuan karena tingkat pendapatan ini akan menentukan kesejahteraan kehidupan mereka nantinya (Prawira, 2018). (Harris & Todaro, 1970) menjelaskan bahwa adanya perbedaan tingkat upah antara pekerja di sektor pertanian dan pekerja di sektor industri ini adalah salah satu faktor seseorang memutuskan untuk migrasi, jika semakin tinggi tingkat upah di sektor industri maka semakin tinggi penduduk melakukan migrasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang dan permasalahan penelitian yang di bahas, maka rumusan masalah yang ingin di bahas dan ingin di teliti oleh peneliti meliputi :

1. Apakah Prevalensi Ketidakcukupan Pangan memengaruhi Pengeluaran Pangan di Indonesia?
2. Apakah Indeks Gini memengaruhi Pengeluaran Pangan di Indonesia?
3. Apakah Pengeluaran Non Makanan memengaruhi Pengeluaran Pangan di Indonesia?
4. Apakah Upah Minimum Provinsi memengaruhi Pengeluaran Pangan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui Pengaruh Prevelensi Ketidakcukupan Pangan terhadap Pengeluaran Pangan di Indonesia.
2. Mengetahui Pengaruh Indeks Gini terhadap Pengeluaraan pangan di Indonesia.
3. Mengetahui Pengaruh Pengeluaran Non Makanan terhadap Pengeluaran Pangan di Indonesia.
4. Mengetahui Pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap Pengeluaran Pangan di Indoensia.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan dampak serta kontribusi terhadap keilmuan dan sebagai informasi tambahan bagi para masyarakat atau peneliti lainnya kedepannya terkait penggunaan metode regresi kuantil sebagai pembahasan topik topik lainnya.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran serta wawasan kepada pemangku kebijakan bahwa pengeluaran pangan dapat berpengaruh besar dalam kelangsungan pertumbuhan ekonomi di Indonesia

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Konsumsi

Konsumsi dapat diartikan sebagai bagian pendapatan rumah tangga yang digunakan untuk membiayai pembelian aneka jasa dan kebutuhan lain. Besarnya konsumsi selalu berubah-ubah sesuai dengan naik turunnya pendapatan, apabila pendapatan meningkat maka konsumsi akan meningkat. Sebaliknya, apabila pendapatan turun maka konsumsi akan turun (Partadireja, 1990).

Konsumsi merupakan pengeluaran total untuk memperoleh barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu tertentu. Khusus untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga, ada faktor yang paling penting menentukan diantaranya tingkat pendapatan rumah tangga (Sayuti, 1989). Perilaku masyarakat membelanjakan sebagian dari pendapatan untuk membeli sesuatu disebut pengeluaran konsumsi. Konsumsi merupakan fungsi dari pendapatan siap pakai (disposable income). Dengan kata lain, fungsi konsumsi menunjukkan hubungan antara tingkat pengeluaran konsumsi dengan tingkat pendapatan yang siap dibelanjakan (Prasetyo, 2011).

Teori konsumsi tersebut yaitu jumlah konsumsi saat ini berhubungan langsung dengan pendapatan. Dari kedua variabel tersebut dapat dijelaskan mengenai fungsi konsumsi yang menggambarkan tingkat konsumsi pada berbagai pendapatan.

$$C = a + bY$$

Keterangan :

C = konsumsi rumah tangga (agregat)

a = konsumsi otonom (besarnya konsumsi ketika pendapatan nol)

b = MPC $Y = \text{disposable income}$

- Teori menurut para Ahli Ekonom

1. Teori John Maynard Keynes

Keynes memiliki teori konsumsi absolut yang disebut sebagai Teori Konsumsi Keynes. Keynes berpendapat bahwa besarnya konsumsi rumah tangga, tergantung dari pendapatan yang dihasilkan. Perbandingan antara besarnya konsumsi dan pendapatan disebut Keynes sebagai *Marginal Propensity to Consume* (MPC). MPC ini digunakan untuk mengukur bahwa semakin besar pendapatan yang dimiliki, maka tingkat konsumsi rumah tangga juga tinggi, dan begitu pula sebaliknya. Untuk menjelaskan teori Keynes tersebut, maka perlu dibuat rancangan perhitungan pendapatan dan konsumsi melalui Teori Konsumsi dengan Hipotesis Pendapatan Absolut. Teori tersebut menyatakan bahwa jumlah pengeluaran konsumsi berkaitan erat dengan pendapatan negara yaitu dapat mempengaruhi fluktuasi perekonomian negara, dimana hal tersebut dapat diukur berdasarkan harga konstan

Fungsi Konsumsi Keynes adalah :

$$C = C_o = cY_d.$$

Dimana C_o adalah konsumsi otonom (*The Autonomus Consumption*), dan Y_d adalah pendapatan yang bisa digunakan untuk konsumsi.

Rumus Y_d adalah $Y - T_x + T_r$.

Dimana T_x adalah pajak, dan T_r adalah subsidi atau transfer. Dari rumus tersebut dapat diperoleh rata-rata konsumsi atau *Average Propensity to Consume* (APC) yaitu perbandingan jumlah konsumsi dibandingkan dengan pendapatan. Kemudian jika terjadi perubahan yaitu tambahan pendapatan sehingga menambah jumlah konsumsi, maka dapat dihitung dengan *Marginal Propensity to Consume* atau perubahan konsumsi yang terjadi karena pendapatan yang meningkat.

2.1.2 Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan adalah perbedaan pendapatan yang terjadi dalam kelompok masyarakat yang mana terdapat kelompok masyarakat yang memiliki penghasilan tinggi dengan kelompok masyarakat yang memiliki penghasilan rendah. Adanya perbedaan pendapatan tersebut merupakan suatu masalah yang

dihadapi oleh sebuah negara, yang mana masalah tersebut merupakan tidak meratanya pendapatan yang diterima oleh setiap masyarakat di suatu negara tersebut. Variasi dalam ketimpangan pendapatan dapat dilihat dari besarnya perbedaan pendapatan yang terjadi. Menurut laporan Bank Dunia pada tahun 2015, ketimpangan pendapatan di Indonesia meningkat pesat sejak tahun 2000. Hal ini dapat terjadi dikarenakan pertumbuhan ekonomi tidak dinikmati oleh semua golongan masyarakat, akan tetapi hanya dinikmati oleh 20 persen masyarakat yang berpendapatan tinggi saja.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada awal tahun 1990-an merupakan awal mula meningkatnya masalah ketimpangan di Indonesia. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 memiliki dampak signifikan terhadap masyarakat yang berpendapatan tinggi sehingga menyebabkan menurunnya angka ketimpangan di Indonesia. Akan tetapi, pada masa pemerintahan presiden Megawati Soekarnoputri dan presiden Susilo Bambang Yudhoyono masalah ketimpangan pendapatan kembali meningkat cepat di antara masyarakat yang memiliki penghasilan tinggi dengan masyarakat yang memiliki penghasilan rendah. Hal ini dikarenakan kekayaan dari masyarakat berpendapatan tinggi mekar lebih cepat dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi.

Ketimpangan pendapatan merupakan suatu kondisi yang menjelaskan kesenjangan antara penduduk yang mana terdiri dari dua jenis golongan penduduk yaitu penduduk yang memiliki penghasilan tinggi dengan penduduk yang berpendapatan rendah. Menurut Todaro (2011:254) menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan merupakan tidak meratanya pendapatan nasional total tiap penduduk dengan penduduk lainnya di dalam suatu negara. Menurut Mydral (Jhingam, 2012:211), penyebab terjadinya ketimpangan pendapatan dikarenakan kuatnya dampak balik (*backwash effects*) dibandingkan dampak sebar (*spread effects*) di negara berkembang.

Alat ukur untuk menilai tingkat ketimpangan pendapatan antara kelompok masyarakat adalah gini ratio. Dari semua pengukur ketimpangan pendapatan, indikator ketimpangan pendapatan yang sering digunakan yaitu indeks gini.

Cara menghitung Koefisien Gini adalah dengan membandingkan luas bidang yang arsiran dengan luas segitga AO'O. Apabila perbandingan lebih kecil, artinya distribusi pendapatan semakin merata dan apabila hasil perbandingan besar maka distribusi pendapatan tidak merata.

Selain itu Koefisien Gini juga bisa dihitung dengan menggunakan rumus:

$$GR = 1 - \sum_{i=1}^n P_i(F_i + F_{i-1})$$

Dari hasil perhitungan koefisien Gini tersebut maka disesuaikan dengan kriteria sebagai berikut:

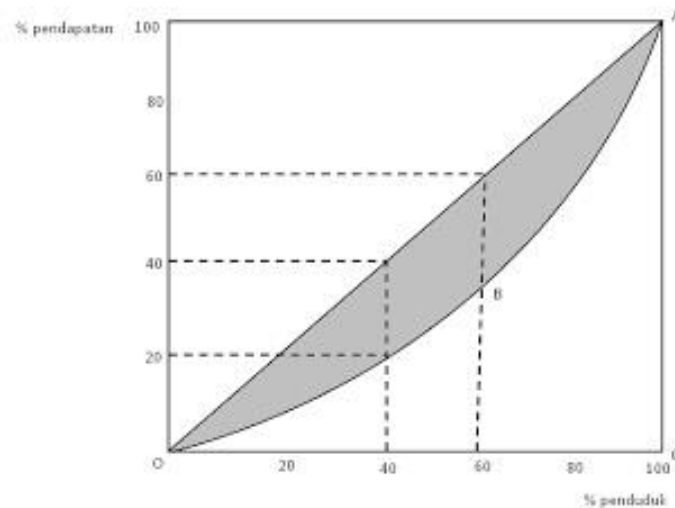
1. $GR < 0.3$ artinya distribusi merata bagus
2. $0.3 \leq GR \leq 0.5$ artinya distribusi pendapatan sedang
3. $GR > 0.5$ distribusi pendapatan buruk

Beberapa ukuran ketimpangan yang sering digunakan antara lain: Indeks Gini, Indeks Wiliamson, Korelasi Pearson dan ukuran ketimpangan dari Bank Dunia. Dalam penelitian ini ukuran ketimpangan yang digunakan adalah Indeks Gini. Indeks Gini adalah salah satu ukuran ketimpangan yang paling sering digunakan untuk mengukur ketimpangan. Indeks Gini adalah ukuran ketimpangan agregat yang nilainya berkisar antara nol dan satu. Nilai indeks Gini nol artinya tidak ada ketimpangan (pemerataan sempurna) sedangkan nilai satu artinya ketimpangan sempurna. Indeks Gini adalah murni ukuran statistik untuk variabilitas dan ukuran normatif untuk mengukur ketimpangan. Indeks Gini bisa dihitung dengan menggunakan Kurva Lorenz.

Indeks Gini dirumuskan sebagai rasio antara luas bidang yang terletak antara Kurva Lorenz dan garis diagonal dengan luas separuh segi empat dimana Kurva Lorenz berada. Kurva Lorenz memperlihatkan hubungan kuantitatif antara persentase

penerima pendapatan dan persentase total pendapatan yang benar-benar diperoleh selama misalnya satu tahun. Semakin jauh kurva Lorenz dari garis diagonal (kemerataan sempurna) semakin tinggi tingkat ketidak merataannya. Semakin tinggi tingkat ketidakmerataan maka kurva lorenznya semakin melengkung mendekati sumbu horizontal.

- Kurva Lorenz (*Lorenz Curve*)



Gambar 2.1. Kurva Lorenz

Kurva Lorenz secara umum sering digunakan untuk menggambarkan bentuk ketimpangan yang terjadi terhadap distribusi pendapatan masyarakat. Kurva Lorenz memperlihatkan hubungan kuantitatif aktual antara persentase penerima pendapatan dengan persentase pendapatan total yang benar-benar mereka terima selama periode tertentu, misalnya satu tahun.

Kurva Lorenz pertama kali dikembangkan oleh seorang ekonom Amerika Serikat bernama Max Otto Lorenz pada 1905. Kurva ini menggambarkan hubungan antara persentase jumlah penduduk dengan persentase pendapatan yang diterima.

Kurva Lorenz digambarkan pada sebuah bidang persegi/bujur sangkar dengan bantuan garis diagonalnya. Sumbu horizontal menunjukkan persentase penduduk penerima pendapatan, sedangkan sumbu vertikal menggambarkan persentase pendapatan. Kurva Lorenz sendiri ditempatkan pada diagonal utama bujur sangkar tersebut.

2.1.3 Ketahanan Pangan

Dari perspektif sejarah, istilah ketahanan pangan (*food security*) mulai mengemuka saat terjadi krisis pangan dan kelaparan yang menimpa dunia pada 1971. Sebagai kebijakan pangan dunia, istilah ketahanan pertama kali digunakan oleh PBB untuk membebaskan dunia, terutama negara-negara sedang berkembang dari krisis produksi dan suplai makanan pokok. Fokus ketahanan pangan pada masa itu, sesuai dengan definisi PBB adalah menitik beratkan pada pemenuhan kebutuhan pokok dan membebaskan dunia dari krisis pangan. Definisi tersebut kemudian disempurnakan pada *International Conference of Nutrition* pada 1992 yang disepakati oleh pimpinan negara anggota PBB, yakni tersedianya pangan yang memenuhi kebutuhan setiap orang, baik dalam jumlah maupun mutu pada setiap individu untuk hidup sehat, aktif dan produktif. Maknanya adalah tiap orang setiap saat memiliki akses secara fisik dan ekonomi terhadap pangan yang cukup agar hidup sehat dan produktif (Hakim 2014).

World Food Summit pada tahun 1996 mendefinisikan ketahanan pangan terjadi apabila semua orang secara terus menerus, baik secara fisik, sosial, dan ekonomi mempunyai akses untuk pangan yang memadai/cukup, bergizi dan aman, yang memenuhi kebutuhan pangan mereka dan pilihan makanan untuk hidup aktif dan sehat (Safa'at, S 2013).

Di Indonesia konsep ketahanan pangan dituangkan dalam Undang-undang No.7 Tahun 1996 tentang Pangan. Dalam definisi tersebut ditegaskan lima bagian dalam konsep tentang ketahanan pangan tersebut, yaitu:

- A. Terpenuhiya pangan yang cukup dari segi jumlah (aspek ketersediaan/ availability), yaitu bahwasanya pangan ada dan jumlahnya mencukupi bagi masyarakat, baik yang bersifat nabati maupun hewani.
- B. Terpenuhiya mutu pangan (aspek kesehatan/ healthy), yaitu bahwasanya pangan yang ada atau diadakan memenuhi standar mutu yang baik dan layak untuk dikonsumsi manusia. Kaitannya dalam pemenuhan kebutuhan gizi mencukupi kebutuhan akan karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral.

- C. Aman (aspek kesehatan/ healthy), yaitu bahwasanya pangan yang dikonsumsi memenuhi standar kesehatan bagi tubuh dan tidak mengandung bahan-bahan yang dapat membahayakan kesehatan manusia.
- D. Merata (aspek distribusi/distribution), yaitu bahwasanya pangan terjamin untuk distribusi secara merata ke setiap daerah sehingga pangan mudah diperoleh masyarakat.
- E. Terjangkau (aspek akses), yaitu bahwasanya pangan memungkinkan untuk diperoleh masyarakat dengan mudah dan harga wajar.

Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*, WHO) mengemukakan tiga pilar ketahanan pangan, yaitu ketersediaan pangan, aksesibilitas pangan, dan pemanfaatan pangan (utilitas). Ketersediaan pangan menyangkut kemampuan individu memiliki sejumlah pangan yang cukup untuk kebutuhan dasarnya. Sementara itu, aksesibilitas pangan berkaitan dengan cara seseorang mendapatkan bahan pangan. Sedangkan utilitas pangan adalah kemampuan dalam memanfaatkan bahan pangan berkualitas (Hakim 2014).

2.1.4 Teori Upah

Upah dapat diartikan sebagai hak yang diterima oleh pekerja berupa imbalan dalam bentuk uang atas pekerjaan yang telah dilakukan seseorang terhadap perusahaan berdasarkan kesepakatan, perjanjian kerja dan peraturan. Selanjutnya, menurut Dewan Penelitian Pengupahan Nasional dalam (Normalitasi, 2012), upah diartikan sebagai suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberian kerja seseorang kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah maupun yang akan dilakukan. berfungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan dinyatakan serta dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, undang undang dan peraturan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja. Sedangkan upah juga dapat diartikan sebagai imbalan jasa yang diterima seseorang didalam hubungan kerja yang berupa uang dan barang, melalui perjanjian kerja, imbalan jasa diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan bagi diri dan keluarganya. Dalam pengertian teori ekonomi, upah yaitu pembayaran yang di peroleh berbagai bentuk

jasa yang disediakan dan diberikan oleh tenaga kerja kepada pengusaha (Sadono Sukino dalam Normalitasari,2012) .

1. Teori Karl Max

Sistem pengupahan di suatu negara didasarkan pada filsafah atau sistem perekonomian negara tersebut. Teori yang mendasari sistem pengupahan pada dasarnya dapat di bedakan menurut dua yaitu.

1. Menurut Karl Marx mengenai teori nilai

2. Pertentangan kelas

Berdasarkan pada teori pertambahan produk marginal berlandaskan asumsi perekonomian bebas (Sony Sumarsono dalam Normalitasari,2012).

Sistem pengupahan dari ekstrim pertama pada umumnya dilaksanakan dinegara penganut paham komunis, sedangkan sistem pengupahan ekstrim kedua pada umumnya dipergunakan di negara–negara kapitalis. Sedangkan sistem pengupahan dan pelaksanaan berdasarkan pandangan Karl mark dibagi menjadi 3 bagian (Normalitasari,2012) :

1. Kebutuhan konsumsi tiap–tiap orang jumlahnya hampir sama, pada nilai (harga) setiap barang hampir sama, maka upah setiap orang kira- kira sama.
2. Sistem pengupahan memberikan intensif yang perlu untuk menjamin peningkatan produktivitas kerja dan pendapatan nasional.
3. Sistem kontrol yang sangat ketat diperlukan untuk menjamin setiap orang yang benar–benar mau bekerja menurut kemampuannya.

1. Teori Upah Menurut Pertambahan Produk Marginal

Pada teori ini juga menyatakan bahwa dalam rangka memaksimalkan keuntungan, pengusaha menggunakan faktor–faktor produksi sedemikian rupa sehingga setiap faktor produksi yang dipergunakan untuk menerima diberikan imbalan sebesar nilai pertambahan hasil marginal dari faktor produksi tersebut. Pengusaha mempekerjakan sejumlah karyawan sedemikian rupa sehingga nilai pertambahan hasil marginal seseorang sama dengan upah yang diterima orang tersebut. Sedangkan dalam teori Neo Klasik menyatakan bahwa karyawan memperoleh upah senilai dengan pertambahan hasil marginalnya. Upah disini berfungsi sebagai imbalan atas usaha kerja yang diberikan seseorang tersebut terhadap pengusaha.

Upah dibayarkan oleh pengusaha sesuai dengan usaha kerja (produktivitas) yang yang diberikan oleh tenaga kerja, artinya pada teori ini dapat diketahui bahwa teori Neo Klasik didasarkan pada asas nilai pertambahan hasil faktor produksi. Dimana upah merupakan imbalan atas pertambahan nilai produksi yang diterima pengusaha dari karyawanya. Teori Neo Klasik menganggap bahwa upah cukup fleksibel di pasar tenaga kerja, sehingga permintaan tenaga kerja selalu seimbang dengan penawaran tenaga kerja dan tidak ada kemungkinan timbulnya pengangguran. Artinya pada tingkat upah riil semua orang yang bersedia untuk bekerja pada tingkat upah tersebut, maka akan memperoleh pekerjaan. Karena pada dasarnya mereka yang menganggur, hanyalah mereka yang tidak bersedia bekerja pada tingkat upah yang berlaku. Jadi mereka ini adalah penganggur yang sukarela.

2.1.5 Regresi Kuantil

Koenker dan Bassett pada tahun 1978 mempublikasikan sebuah alat analisis yang dikenal dengan regresi kuantil. Model dimana nilai kuantil dari distribusi kondisional dari variabel respons dinyatakan sebagai fungsi kovariat yang diamati (Koenker & Hallock, 2001). Regresi kuantil digunakan dengan mengelompokkan data menjadi dua bagian atau lebih ketika terdapat dugaan perbedaan nilai estimasi pada kuantil-kuantil tertentu (Rahmawati dkk., 2011).

Regresi kuantil berfungsi jika distribusi data tidak homogen dan tidak berbentuk standar atau tidak simetris. Misalkan Y adalah variabel sembarang dengan fungsi distribusi F_Y dan θ adalah konstanta dimana $0 < \theta < 1$. Kuantil ke θ dari F_Y , dinotasikan sebagai $q_Y(\theta)$ adalah penyelesaian untuk $F_Y(q) = \theta$, yaitu :

$$q_Y\theta = f_Y^{-1}(\theta) = \inf\{y : f_Y(y) \geq \theta\}$$

Sehingga $100\theta\%$ ($100(1 - \theta)\%$) dari kemungkinan Y berada di bawah $q_Y(\theta)$. Sebagaimana dengan metode OLS yang meminimalkan jumlah kuadrat untuk mendapatkan estimasi β , regresi kuantil dapat memperoleh kuantil ke- θ dengan meminimalkan fungsi sehubungan dengan peningkatan q :

$$\theta \int_{y>q} |y - q| dF_Y(y) + (1 - \theta) \int_{y<q} |y - q| dF_Y(y)$$

$$= \theta \int_{y>q} |y - q| dF_Y(y) - (1 - \theta) \int_{y<q} |y - q| dF_Y(y)$$

Dengan meminimalkan fungsi tersebut, maka didapat persamaan yaitu:

$$\begin{aligned} 0 &= -\theta \int_{y>q} F_Y(y) + (1 - \theta) \int_{y<q} dF_Y(y) \\ &= -\theta [1 - F_Y(q)] + (1 - \theta) F_Y(q) \\ &= -\theta + F_Y(q) \end{aligned}$$

Oleh karena itu, kuantil ke θ merupakan penyelesaian dari F_Y . Jika Y seperti fungsi dari X yang telah didapati, maka mempunyai peluang $F_{Y|X}(y)$, kuantil ke- θ dari fungsi itu dapat dicatat sebagai $Q_{Y|X}(\theta) := F_{Y|X}^{-1}(\theta)$. $Q_{Y|X}(\theta)$ menciptakan fungsi dari X dan disempurnakan dengan persamaan berikut:

$$\min_q \theta \int_{y>q} |y - q| dF_Y(y) + (1 - \theta) \int_{y<q} |y - q| dF_Y(y) \quad (1)$$

$Q_{Y|X}(0.5)$ merupakan nilai tengah dari Y (sebagai fungsi dari X) yang menyatakan titik simetri dari $F_{Y|X}$; ketika θ mencapai 0 (atau 1), $Q_{Y|X}(\theta)$ memperlihatkan ekor kiri (atau kanan) dari $F_{Y|X}$.

Dalam catatan matriks, jika $Q_{Y|X}(\theta)$ merupakan fungsi linear $X'\beta$, maka persamaan 1 akan menjadi:

$$\min_q \theta \int_{y>X'\beta} |y - X'\beta| dF_Y(y) + (1 - \theta) \int_{y<q} |y - X'\beta| dF_Y(y) \quad (2)$$

Penyelesaian dari persamaan 2 ini dinotasikan menjadi β_θ dan kuantil Y (sebagai fungsi dari X) ke- θ adalah $Q_{Y|X}(\theta) = X'\beta_\theta$

Misalnya dibagikan data (y_t, x_t') untuk $t=1, 2, \dots, T$, dimana x_t berukuran $k \times 1$, model linier untuk persamaan Regresi Kuantil dapat ditulis sebagai:

$$y_t = x_t' \beta + e_t \quad (3)$$

dengan $Q_\theta(y_t|x_t) = x_t' \beta$ merupakan kuantil ke- θ ($0 < \theta < 1$) dari y dengan sebanyak nilai x_t tertentu. Nilai estimator β dari Regresi Kuantil ke- θ adalah meminimalkan penambahan nilai absolut dari *error* dengan memanfaatkan bobot θ untuk *error* positif dan pembobot $(1 - \theta)$ untuk *error* negatif yaitu:

$$\hat{\beta} = \min_{\beta} \{ \theta \sum_{t; y_t \geq x_t' \beta} |y_t - x_t' \beta| + (1 - \theta) \sum_{t; y_t < x_t' \beta} |y_t - x_t' \beta| \} \quad (4)$$

atau

$$\hat{\beta} = \min_{\beta} \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \rho_{\theta} u_t \quad (5)$$

$$\text{dimana } \rho_{\theta}(u_t) = \begin{cases} \theta u_t & , \text{jika } u_t \geq 0 \\ (\theta - 1)u_t, & \text{jika } u_t < 0 \end{cases}$$

$\rho_{\theta}(u_t)$ disebut sebagai *Check Function* dan kesalahan dalam memperkirakan y adalah $\hat{e}_t = y_t - x_t' \beta$. Persamaan 4 tidak disempurnakan secara analisis logis, tetapi secara numerik seperti metode *simplex*, metode *interior point* atau metode *smoothing*.

Kuantil adalah nilai yang mengelompokkan data yang berurutan menjadi empat bagian yang sama. Kuantil yang membagi data menjadi dua bagian yang sama dinamakan median, menjadi empat bagian disebut kuartil (Q_1, Q_2, Q_3), menjadi sepuluh bagian dinamakan desil ($D_1, D_2, \dots D_9$), dan menjadi 100 bagian dinamakan persentil ($P_1, P_2, \dots P_{99}$).

2.2 Peneliti Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Teknik Analisis	Hasil Penelitian
1	Rizka Faradina, Iskandarini, Satia Negara Lubis, Analisis Faktor -Faktor yang Mempengaruhi Pengeluaran Konsumsi Pangan Rumah Tangga (Studi Kasus : Desa Karang Gading, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat)	Regresi Linier berganda	1.Faktor-faktor, secara serempak pendapatan keluarga, tingkat pendidikan ibu, jumlah anggota keluarga, dan umur perkawinan mempengaruhi pengeluaran pangan untuk konsumsi pangan rumah tangga. Secara parsial memiliki pengaruh yang nyata terhadap pengeluaran rumah tangga adalah: pendapatan rumah tangga dan jumlah anggota rumah tangga, sedangkan yang tidak memiliki pengaruh yang nyata/ signifikan terhadap pengeluaran rumah tangga adalah tingkat pendidikan ibu rumah tangga dan lamanya berumah tangga/ umur perkawinan. 2.Rumah tangga yang ada di Desa Karang Gading, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat termasuk rumah tangga tidak tahan pangan karena sebanyak 65% sampel rumah tangga memiliki besar pangsa atau persentase pengeluaran pangan yang tinggi.

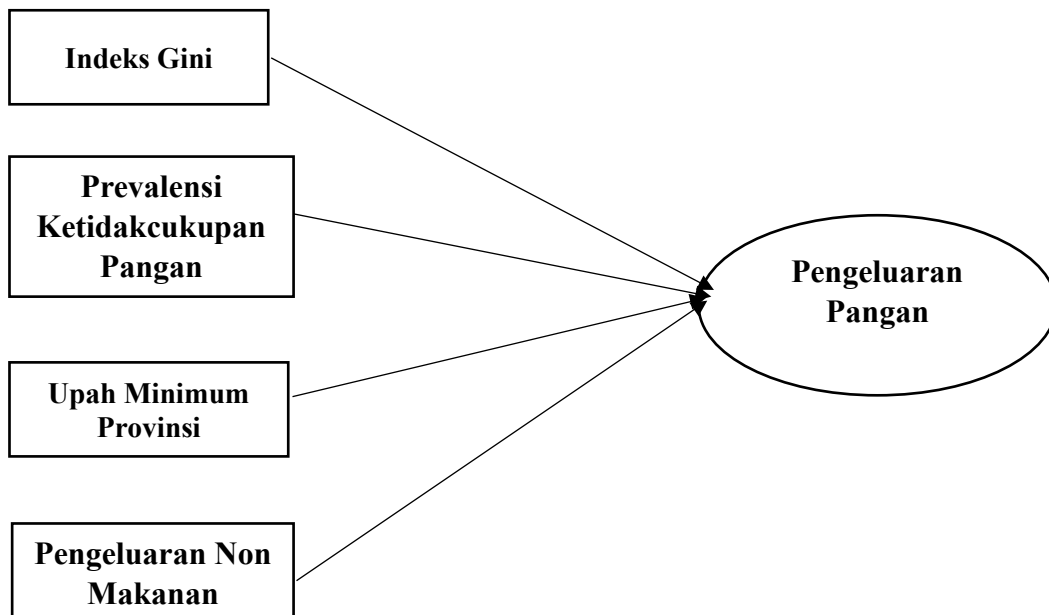
No	Judul	Teknik Analisis	Hasil Penelitian
2	Yossi Erawati (2019) Analisis faktor-faktor yang memengaruhi pengeluaran pangan di Indonesia	Regresi Berganda	1. Inflasi pangan di Indonesia berpengaruh signifikan dan negatif terhadap pengeluaran konsumsi pangan di Indonesia, dimana $\text{prob} = 0,0007 < \alpha = 0,05$. Artinya, besar kecilnya pengeluaran konsumsi pangan di Indonesia dipengaruhi tinggi rendahnya tingkat inflasi. Apabila tingkat inflasi tinggi maka pengeluaran konsumsi akan turun. Dan sebaliknya apabila inflasi pangan turunkan menaikkan konsumsi pangan di Indonesia. 2. Jumlah penduduk berpengaruh signifikan dan positif terhadap pengeluaran konsumsi pangan di Indonesia, dimana $\text{prob} = 0,0000 < \alpha = 0,05$. Artinya, besar kecilnya pengeluaran konsumsi pangan di Indonesia ditentukan oleh tinggi rendahnya jumlah penduduk, atau dengan kata lain semakin tinggi jumlah penduduk semakin tinggi juga pengeluaran konsumsi pangan di Indonesia. Dan sebaliknya, semakin turun jumlah penduduk maka pengeluaran konsumsi pangan di Indonesia juga akan turun. 3. Pendapatan nasional berpengaruh signifikan dan negatif terhadap konsumsi pangan di Indonesia, dimana $\text{prob} = 0,0003 < \alpha = 0,05$. Apabila pendapatan naik tidak serta merta menaikkan pengeluaran konsumsi pangan. Dan sebaliknya apabila pendapatan menurun tidak serta merta menurunkan pengeluaran konsumsi pangan di Indonesia. Inflasi pangan, jumlah penduduk dan pendapatan nasional berpengaruh signifikan dimana sumbangan semua variabel tersebut sebesar 97,8512 persen, dan selebihnya 2,15 di pengaruhi variabel lain
3	Muhammad Ayaz dkk. (2023) Determinan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di	Analisis data kuantitatif melibatkan perhitungan indeks Forster-	Praktik perlindungan sosial seperti program jaring pengaman produktif memiliki dampak positif dalam meningkatkan konsumsi dan pendapatan komunitas pastoral dan agropastoral di wilayah Afar. Tingkat kemiskinan yang tinggi dan tingkat

No	Judul	Teknik Analisis	Hasil Penelitian
	komunitas pastoral dan agro-pastoral: Bukti berbasis rumah tangga dari Negara Bagian Afar, Ethiopia	Greer-Thorbecke (FGT) dan penerapannya	ketidaksetaraan pendapatan yang mengkhawatirkan adalah ciri-ciri rumah tangga di komunitas pastoral dan agro-pastoral. 47,6 persen rumah tangga hidup di bawah garis kemiskinan (Birr 389) dengan indeks kesenjangan kemiskinan sebesar 0,178 dan indeks keparahan kemiskinan sebesar 0,092. Jadi, kemiskinan tidak hanya menyebar luas, tetapi juga mendalam. Rumah tangga yang kekurangan pangan membentuk 33,7 persen dari total rumah tangga, dan ini terletak 11,4 persen di bawah garis kemiskinan pangan, dengan indeks keparahan kemiskinan kuadrat sebesar 0,054. Ada tingkat kemiskinan yang tinggi di komunitas pastoral (35,6%), dan 38,5 persen dari para pengembala yang berpindah memiliki tingkat kemiskinan pangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan rumah tangga yang tidak berpindah. 35,6 persen rumah tangga yang tidak berpartisipasi dalam Program Jaring Pengaman Produktif dan 32 persen dari yang berpartisipasi.
4	Marta Desna Fitria Br. Lumban Gaol (2021) Determinan Status Kerawanan Pangan Rumah Tangga di Nusa Tenggara Timur 2021	model regresi logistik biner multilevel (dua level) dengan random intercept	Sebagian besar rumah tangga di Provinsi NTT tahun 2021 berstatus rawan pangan. Determinan status kerawanan pangan rumah tangga di Provinsi NTT tahun 2021 adalah wilayah tempat tinggal, jenis kelamin KRT, umur KRT, lapangan usaha KRT, jumlah ART, status kemiskinan rumah tangga, status penerima bantuan pangan, sumber air minum layak, dan jumlah kelompok pertokoan dan pasar. Rumah tangga di perdesaan, dikepalai KRT perempuan, dikepalai KRT usia dewasa, dikepalai KRT bekerja di sektor pertanian, ukuran keluarga kecil, rumah tangga miskin, rumah tangga penerima bantuan pangan, dan rumah tangga yang mengonsumsi air minum tidak layak cenderung berstatus rawan pangan.BR
5	Ahmad Zainuddin, Ratih Apri Utami,Nurul Dwi Novikarumsari (2020)	Regresi Data Panel	Terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur dimana masyarakat Jawa Timur mendorong peningkatan jumlah pengeluaran untuk non makanan lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluaran makanan.Faktor-faktor

No	Judul	Teknik Analisis	Hasil Penelitian
	Determinan tingkat Pengeluaran Konsumsi Pangan di Jawa Timur		yang mempengaruhi pengeluaran pangan rumah tangga di Jawa Timur adalah PDRB perkapita, tingkat inflasi, harga beras dan pengeluaran non pangan. PDRB per kapita berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan yang positif terhadap pengeluaran konsumsi pangan. Nilai Marginal Propensity to Consume (MPC) terhadap pangan adalah sebesar 0,375. Artinya setiap peningkatan 1 juta rupiah pendapatan rumah tangga akan meningkatkan konsumsi pangan rumah tangga di Jawa Timur sebesar 0,375 juta rupiah.
6	Fikrman dkk, (2020), Faktor yang mempengaruhi pengeluaran pangan rumah tangga miskin di kecamatan bangko, kabupaten merangin	metode analisis regresi linier berganda	Secara bersama-sama atau serempak pendapatan, pendidikan ibu rumah tangga, jumlah anggota keluarga dan bantuan sosial terhadap pangan berpengaruh terhadap pengeluaran pangan rumah tangga miskin dengan nilai F hitung (5,400) > nilai F tabel (2,463) dan secara parsial atau individu, faktor yang berpengaruh terhadap pengeluaran untuk konsumsi pangan rumah tangga miskin adalah jumlah anggota keluarga dan bantuan sosial terhadap pangan. 2. Faktor jumlah anggota keluarga adalah faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap pengeluaran pangan rumah tangga miskin di Kecamatan Bangko dengan nilai t hitung 3,446 > dari nilai t tabel 1,9.

2.3 Kerangka pemikiran

Cara berpikir dalam penelitian ini adalah untuk dan menjelaskan bagaimana penulis ingin menggambarkan masalah pada objek penelitian. Bagaimana peneliti akan menjelaskan langkah yang dipengaruhi terhadap beberapa langkah yang beberapa langkah dalam indek Pengeluaran Pangan.



2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara untuk pertanyaan penelitian yang didasarkan pada data dikumpulkan, maka pengujian hipotesis dilakukan sebagai berikut:

1. Diduga Prevalensi Ketidacukupan Pangan berpengaruh positif signifikan terhadap Pengeluaran pangan.
2. Diduga Indeks Gini berpengaruh negatif signifikan terhadap Pengeluaran pangan.
3. Diduga Pengeluaran Non Makanan berpengaruh negatif signifikan terhadap Pengeluaran Pangan.
4. Diduga Upah Minimum Provinsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengeluaran Pangan.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode Kuantitatif dengan Analisis deskriptif, dimana pendekatan ini menggunakan metode Regresi Kuantil. Kemudian pendekatan deskriptif digunakan untuk membahas dan menjelaskan hasil-hasil dari intrepetasi yang diperoleh dari analisis kuantitatif. Penulis menggunakan Metode ini membagi data menjadi beberapa kelompok yang diduga mempunyai penilaian berbeda dari beberapa parameter pada kuantil kuantil tertentu.

3.2 Waktu dan tempat penelitian

Untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian ini, maka penelitian menggunakan data sekunder. Dalam penelitian ini data sekunder dikumpulkan dengan menggunakan data yang tertera dalam website instansi resmi yang dapat diakses seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pangan Indonesia, World Bank.

3.3 Jenis dan sumber data

Berikut ini merupakan data Variabe, Simbol, Satuan, dan Sumber data yang digunakan penulis untuk melakukan penelitian

Tabel 3.1. Variabel, Simbol, Satuan, dan Sumber Data.

No	Variabel	Simbol	Satuan	Sumber Data
1	Pengeluaran Pangan	PP	Rupiah (Rp)	Badan Pusat Statistik (BPS)
2	Prevelensi ketidacukupan pangan	PKP	Persen (%)	Badan Pusat Statistik (BPS)
3	Indeks Gini	IG	Indeks	Badan Pusat Statistik (BPS)
4	Upah Minimum Provinsi	PNM	Rupiah (Rp)	Badan Pusat Statistik (BPS)
5	Pengeluaran Non Makanan	PNM	Rupiah (Rp)	Badan Pusat Statistik (BPS)

3.4 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel pada penelitian ini meliputi variabel-variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini dengan membatasi subjek penelitian sebagai berikut:

1. Pengeluaran Pangan

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber daya hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan dan minuman. Pengeluaran Pangan Rumah Tangga adalah jumlah pendapatan rumah tangga yang dialokasikan untuk kebutuhan pangan yang dibeli oleh rumah tangga, yang dinyatakan dalam uang (rupiah) pada periode waktu satu bulan.

2. Prevalensi Ketidacukupan Pangan

Prevalensi ketidacukupan pangan persentase penduduk yang mengonsumsi makanan, tetapi kurang dari kebutuhan energinya. Indikator ini dapat menggambarkan perubahan dalam ketersediaan makanan dan kemampuan rumah tangga mengaksesnya di tingkat sosial ekonomi yang berbeda.

3. Indeks Gini

Indeks gini adalah indikator ekonomi yang mengukur ketimpangan pendapatan antar masyarakat di sebuah negara. Nama lain dari indikator ini adalah koefisien gini atau rasio gini. Nilai indeks gini berkisar antara 0-1. Sebuah daerah akan memiliki skor 0 apabila penduduk daerah tersebut memiliki distribusi pendapatan yang merata. Sebaliknya, kalau sebuah daerah memiliki skor 1, itu artinya 1 orang di daerah tersebut menguasai seluruh sumber pendapatan.

4. Upah Minimum Provinsi

Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang ditetapkan setiap tahun sebagai jaring pengaman di suatu wilayah. Upah minimum menjadi batas bawah nilai upah karena aturan melarang pengusaha membayar upah pekerjanya lebih rendah dari Upah Minimum. Upah minimum dapat ditetapkan di Provinsi atau sering disebut dengan sebutan Upah Minimum Provinsi atau ditetapkan di Kabupaten/Kota disebut dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota.

5. Pengeluaran non Makanan

Besar kecilnya uang yang dikeluarkan konsumsi non makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga yang berpenghasilan rendah. Makin tinggi tingkat penghasilan rumah tangga, makin kecil pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Tinggi rendahnya tingkat pendapatan masyarakat dapat diproksi dengan pengeluaran non makanan (BPS,2008).

3.5 Populasi dan sampel penelitian

Penelitian ini berfokus pada pembahasan 34 Provinsi di Indonesia tahun 2020. Populasi yang digunakan merupakan keseluruhan objek penelitian yang ada di dalamnya bisa didapatkan data atau informasi penelitian. Dengan melihat keterbatasan waktu, tenaga, luas wilayah, dalam menentukan jumlah sampel dengan melakukan observasi pencarian data yang sudah ada yang bersumber dari situs resmi pemerintah terkait.

3.6. Metode Analisis Data

Dalam Penelitian ini alat analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi kuantil data *cross-section*. Data *cross-section* adalah kumpulan kuantitas yang diperoleh di beberapa individu, yang dikumpulkan dalam interval waktu yang genap dan diurutkan secara kronologis. Regresi linier berganda dengan satu variabel respon dan variabel prediktor berganda dapat digambarkan dengan persamaan berikut:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_j X_{ij} + \varepsilon_i$$

Di mana y dan x merupakan variabel respon dan variabel prediktor dengan indeks $i = 1, 2, \dots, n$ dan $j = 1, 2, \dots, p$. Sedangkan β_0 adalah konstanta, β_j adalah kemiringan atau *slope* dan ε_i adalah galat.

Analisis data digunakan untuk mengamati hubungan antara satu variabel terikat (*dependent variable*) dengan satu atau lebih variabel bebas (*independent variable*).

Penelitian ini menggunakan *stata* sebagai alat analisis data. Model untuk data regresi *cross section* adalah sebagai berikut:

$$PP_{it} = \beta_0 + \beta_1 PKP_{it} + \beta_2 IG_{it} + \beta_3 PNM_{it} + \beta_4 UMP_{it} + e_{it}$$

Keterangan :

PP_{it}	: Pengeluaran Pangan (Rp)
β_0	: Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_4$	: Koefisien regresi
PKP_{it}	: Prevalensi Ketidakcukupan Pangan (%)
IG_{it}	: Indeks Gini (Indeks)
PNM_{it}	: Pengeluaran Non Makanan (Rp)
UMP_{it}	: Upah Minimum Provinsi (Rp)
e_{it}	: <i>Error term</i>

3.7 Metode Analisis OLS

Hasil estimasi regresi yang didapatkan merupakan hasil estimasi dengan sifat BLUE apabila asumsi-asumsinya terpenuhi. Asumsi-asumsi tersebut disebut dengan asumsi klasik, yaitu:

a) Normalitas

Analisis regresi linier mengasumsikan bahwa error berdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan variansi σ^2 (Gujarati, 2004). Uji signifikansi pengaruh variabel independent terhadap variabel *dependen* melalui uji t hanya akan valid jika residual yang didapatkan mempunyai distribusi normal. Ada beberapa metode yang digunakan untuk mendeteksi apakah residual mempunyai distribusi normal atau tidak (Widarjono, 2018) yaitu:

- 1) Melalui Histogram
- 2) Uji Jarque-Bera (J-B)
- 3) *Skewness dan Kurtosis*

Jika, residual terdistribusi secara normal, maka statistik JB sama dengan nol.

H_0 = Residu tersebar secara normal

H_a = Residu tersebar tidak normal.

Standard pengambilan keputusan untuk normalitas ialah ketika nilai probabilitas χ^2 dari *Skewness dan Kurtosis* lebih besar dari tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ maka kita gagal menolak H_0 , artinya residual data tersebut mempunyai distribusi normal karena $\chi^2 > 5\%$. Jika χ^2 dari *Skewness dan Kurtosis* lebih kecil dari tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ maka kita berhasil menolak H_0 , artinya residual data tersebut mempunyai distribusi yang tidak normal karena $\chi^2 < 5\%$.

B) Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan ketika residual dari variabel yang digunakan dalam model tidak memiliki varians yang sama. Heteroskedastisitas adalah fenomena dimana estimator regresi bias dan varians yang tidak efisien dimana semakin besar populasi atau sampel, maka semakin besar varians. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain dalam suatu model regresi. Adanya heteroskedastisitas menyebabkan estimasi regresi yang tidak efisien baik untuk sampel kecil maupun besar. pemeriksaan asumsi ini dapat dilakukan dengan berbagai uji seperti, uji menggunakan metode Park, metode Glejser, dan metode GoldFeld-Quandt (Widarjono, 2018).

Masalah heteroskedastisitas dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan metode Breusch-Pagan LM test. Apabila nilai Obs*R-Squared (*Chi-Square*) lebih kecil daripada nilai Chi-Tabel maka tidak terdapat heteroskedastisitas. Sebaliknya, apabila nilai Obs*R-Squared (*Chi-Squared*) lebih besar daripada Chi-Tabel maka terdapat heteroskedastisitas. Selain itu dapat pula ditentukan melalui nilai Prob. Chi Square dengan Kriteria yang digunakan dalam uji Breusch Pagan Godfrey adalah sebagai berikut :

- 1) Jika nilai Prob. Chi Square lebih kecil dari alpha (α) 0,05 maka disimpulkan bahwa terdapat masalah heteroskedastisitas pada model.
- 2) Jika nilai Prob. Chi Square lebih besar dari alpha (α) 0,05 maka disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas pada model

C) Multikolinieritas

Multikolinearitas merupakan suatu kondisi yang melihat apakah ada korelasi antara variabel *independen*. Multikolinearitas dapat dibuktikan dengan menguji nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) (Widarjono, 2018). Cara mendeteksi multikolinieritas adalah dengan cara melihat model jika memiliki *standard error* yang besar dan nilai statistik *t* yang rendah maka itu merupakan indikasi awal adanya masalah multikolinieritas.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan program pengolah data untuk melihat ada atau tidaknya multikolinieritas pada model dengan melihat nilai *Variance Infaltion Factors* (VIF). Kriteria yang digunakan dalam uji multikolinieritas dengan metode VIF adalah jika nilai VIF melebihi angka 10 ($VIF > 10$), maka dapat dikatakan ada multikolinieritas. Jika nilai VIF dibawah angka 10 ($VIF < 10$), maka tidak ada multikolinieritas.

- Pengujian Signifikansi Parameter

- a. Uji *Partial* (Uji Statistik *t*)

Untuk menguji signifikansi pengaruh masing-masing variabel *independen* terhadap variabel *dependen* adalah dilakukan uji *t*. Uji *partial* atau uji statistik *t* pada dasarnya memperlihatkan seberapa besar pengaruh satu variabel *independen* secara individual dalam menerangkan variasi variabel *dependen*. Untuk mengkaji pengaruh variabel *independen* terhadap variabel *dependen* secara individu dapat dilihat hipotesis berikut:

- 1) Uji *t* untuk Variabel Prevalensi Ketidacukupan Pangan

- $H_0 : \beta_1 < 0$, Tidak terdapat pengaruh antara Prevalensi Ketidacukupan Pangan terhadap Pengeluaran Pangan
 - $H_a : \beta_1 > 0$, Terdapat pengaruh positif antara Prevalensi Ketidacukupan Pangan terhadap Pengeluaran Pangan

- 2) Uji *t* untuk Variabel Indeks Gini

- $H_0 : \beta_2 < 0$, Tidak terdapat pengaruh antara Indeks Gini terhadap Pengeluaran Pangan
 - $H_a : \beta_2 > 0$, Terdapat pengaruh positif antara Indeks Gini terhadap Pengeluaran Pangan

3) Uji t untuk Variabel Upah Minimum Provinsi

- $H_0 : \beta_3 > 0$, Tidak terdapat pengaruh antara Upah Minimum Provinsi terhadap Pengeluaran Pangan
- $H_a : \beta_3 < 0$, Terdapat pengaruh negatif antara Upah Minimum Provinsi terhadap Pengeluaran Pangan

4) Uji t untuk Variabel Pengeluaran non Makanan

- $H_0 : \beta_3 > 0$, Tidak terdapat pengaruh antara Pengeluaran non Makanan terhadap Pengeluaran Pangan
- $H_a : \beta_3 < 0$, Terdapat pengaruh negatif antara Pengeluaran non Makanan Provinsi terhadap Pengeluaran Pangan

Kriteria pengujian :

- Jika signifikansi nilai $t_{hitung} < \alpha$ ($\alpha = 0,05$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel *dependen* dengan variabel *independent* nya;
- Jika probabilitas $t_{hitung} > \alpha$ ($\alpha = 0,05$) maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel *dependen* dengan variabel *independent* nya.

• Regresi Kuantil

Analisis regresi memiliki parameter-parameter yang perlu diestimasi karena nilainya belum diketahui. Metode estimasi parameter yang sering digunakan adalah Metode Kuadrat Terkecil . Analisis regresi yaitu studi tentang dependensi suatu variabel pada satu atau lebih variabel lain dengan tujuan memperkirakan nilai rata-rata dari variabel tersebut (Gujarati, 2004). Pada langkah ini, peneliti menggunakan regresi kuantil untuk membagi variabel konsumsi rumah tangga menjadi 4 bagian yaitu pada 4 langkah 25%, 50%, 75%, 85%. Penelitian ini akan menampilkan wilayah–wilayah di provinsi Indonesia yang termasuk kedalam golongan atau tingkatan pencilan dari 25%, 50%, 75%, 85%. Besar kecilnya Pengeluaran Pangan di setiap provinsi dipengaruhi oleh 4 variabel yaitu Prevalensi Ketidacukupan Pangan, Indeks Gini, Upah Minimum Provinsi, dan Pengeluaran Non Makanan. Untuk melakukan regresi kuantil diperlukan beberapa langkah yaitu:

1) Melakukan Estimasi Pada Regresi Kuantil

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, estimasi memiliki makna perkiraan, pendapat, dan penilaian. Pada sebuah data yang akan diteliti, melakukan sebuah estimasi ialah cara yang perlu dilakukan untuk melihat nilai spesifik untuk parameter (Iskandar, 2019). Pada regresi kuantil ini, penulis melakukan estimasi dengan membagi data menjadi 4 bagian. Untuk melakukan estimasi ini, penulis menggunakan *software* stata 16 dimana pembagian tersebut sebagai berikut:

- a) Tingkatan 25%. Pada tingkatan ini, peneliti akan mengelompokkan data dengan bantuan *software* stata dimana akan menghasilkan data yang memiliki nilai pengeluaran pangan terendah di provinsi Indonesia tahun 2020.
- b) Tingkatan 50%. Pada tingkatan ini, peneliti akan mengelompokkan data dengan bantuan *software* stata dimana akan menghasilkan data yang memiliki nilai pengeluaran pangan yang berada diantara terendah dan terbesar di provinsi Indonesia tahun 2020.
- c) Tingkatan 75%. Pada tingkatan ini, peneliti akan mengelompokkan data dengan bantuan *software* stata dimana akan menghasilkan data yang memiliki nilai pangan yang terbesardi provinsi Indonesia tahun 2020.
- d) Tingkatan 85%. Pada tingkatan ini, peneliti akan mengelompokkan data dengan bantuan *software* stata dimana akan menghasilkan data yang memiliki nilai pangan yang terbesardi provinsi Indonesia tahun 2020.

2) Melakukan Interpretasi Dari Masing – Masing Kuantil

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, interpretasi merupakan pemberian kesan, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap sesuatu. Pada data penelitian ini, dari hasil estimasi menjadi beberapa tingkatan tersebut akan diinterpretasikan dari nilai yang sudah diperlihatkan. Pada nilai – nilai estimasi masing kuantil tersebut akan dijelaskan bagaimana pengaruh dan hubungannya apakah variabel – variabel yang digunakan sama dengan hipotesis atau tidak. Setelah hasil regresi kuantil akan di interpretasikan pada masing–masing tingkatan, kemudian melakukan pemodelan dan uji model terbaik.

3) Pemodelan Regresi Kuantil dan Melakukan Uji Model Terbaik

Sama dengan regresi pada umumnya, pada regresi kuantil perlu dilihat model mana yang terbaik diantara model lainnya. Uji model regresi kuantil diperlukan untuk menentukan model mana yang terbaik digunakan jika variabel tersebut dibagi menjadi beberapa bagian. Karena pada penelitian ini melihat data menjadi 4 bagian, maka dari model yang sudah dilakukan estimasi akan dilihat model mana yang terbaik. Cara untuk menentukan model terbaik pada regresi kuantil adalah dengan melihat nilai R^2 dari masing – masing kuantil. Nilai R^2 merupakan nilai yang memperlihatkan seberapa besar variabel bebas dapat berpengaruh terhadap variabel terikat. Semakin besar nilai R^2 , maka semakin besar pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan mendeskripsikan Prevalensi Ketidacukupan Pangan, Indeks Gini, Upah Minimum Provinsi, dan Pengeluaran Non Makanan terhadap Pengeluaran Pangan provinsi di Indonesia pada tahun 2020 dengan dan regresi kuantil. Kesimpulan yang didapatkan untuk analisis regresi kuantil sebagai berikut:

- 1) Prevalensi Ketidacukupan Pangan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pengeluaran Pangan di provinsi Indonesia tahun 2020.
- 2) Indeks Gini berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pengeluaran Pangan provinsi di Indonesia tahun 2020. Artinya nilai Indeks Gini tidak akan mendorong Pengeluaran Pangan, tetapi penurunan Indeks Gini akan menyebabkan turunnya Pengeluaran Pangan.
- 3) Upah Minimum Provinsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengeluaran Pangan provinsi di Indonesia tahun 2020. Artinya setiap bertambahnya Upah Minimum Provinsi akan meningkatkan Pengeluaran Pangan, sebaliknya setiap berkurangnya Upah Minimum Provinsi akan menurunkan Pengeluaran Pangan.
- 4) Pengeluaran Non Makanan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pengeluaran Pangan. Artinya setiap bertambahnya Pengeluaran Non Makanan tidak akan memengaruhi Pengeluaran Pangan, sebaliknya setiap berkurangnya Pengeluaran Non Makanan akan memengaruhi Pengeluaran Pangan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dari pembahasan dan analisis data yang dilakukan oleh peneliti, peneliti berharap penelitian ini menjadi bahan pertimbangan bagi para pemangku kebijakan serta bisa menjadi wawasan yang lebih bagi para pembaca atau menjadi refresnsi untuk penelitian yang selanjutnya.

- 1) Untuk pemerintah Indonesia sebagai pemangku kebijakan diharapkan lebih memperhatikan masyarakat di wilayah terhadap angka Pengeluaran Pangan di masyarakat karena Pengeluaran Pangan menjadi salah satu aspek penting dalam keberlangsungan hidup dan menjadi tolak ukur dalam hal konsumsi .
- 2) Pada penelitian ini hanya melihat Pengeluaran Pangan provinsi di Indonesia dalam satu periode yaitu tahun 2020, sehingga tidak mampu melihat tren perkembangan kedepannya. Peneliti selanjutnya diharapkan bisa melakukan metode dalam waktu dan periode yang terbaru sehingga menghasilkan hasil yang diharapkan. Selain itu, penelitian selanjutnya bisa menambahkan variable yang memengaruhi dalam Pengeluaran Pangan sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan untuk pemerintah untuk menaikkan Pengeluaran Pangan di waktu yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Asih Murwiati, R. Z. (2023). Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Keluarga Penerima Manfaat, dan Inflasi Terhadap Konsumsi Rumah . *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 8631-8634.
- Bakar, A. (2020). Analisis Pengaruh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mimika Jurnal Kritis Volume 4 nomor 2 edisi Oktober 2020, 16-39.
- E.Sugianti, B. (2021). Prevalensi Ketahanan Pangan dan Hubungannya dengan Kejadian Stunting pada Rumah Tangga di Daerah Rawan Pangan. UMP.
- Eka Nurchitra Ayu Ningtias, A. F. (2021). Mengukur dampak Pengangguran, Tingkat Pendidikan, Upah Minimum, dan Pengeluaran Per Kapita terhadap Kemiskinan di Kota Makassar. *Bulletin of Economic Studies (BEST)* , 1-12.
- Eka Rastiyanto Amrullah, A. P. (2020). Dampak Bantuan Langsung Tunai terhadap Ketahanan Pangan Rumah Tangga di Indonesia, *Jurnal Agro Ekonomi*, Vol. 38No.2, Oktober 2020:91-104, 91-104.
- Eriawati, Y. (2019). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi Konsumsi Pangan di Indonesia. *Jurnal education and development*.
- F. Budiman, E. A. (2020). Faktor sosial ekonomi yang memengaruhi Pengeluaran Pangan Rumah Tangga Miskin di Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin. *Jurnal Agri Sains*.
- Faradina, R. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengeluaran Konsumsi Pangan Rumah Tangga (Studi Kasus : Desa Karang Gading, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat). Talenta Publisher, Universitas Sumatera Utara.
- Gek Ayu Nina, S. D. (2020). Determinan Kemiskinan dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali . *Jurnal Ekonomi Pembangunan (JEP)*, 24-36.
- Isma Nur Amalia, T. M. (2017). Hubungan Pendapatan, Total Pengeluaran, Proporsi Pengeluaran Pangan dengan Status Ketahanan Rumah Tangga Petani Gurem. CC BY – SA license.

- J.Ekonomi, R. U. (2023). Pengaruh Indeks Gini Rasio, Indeks Kemahalan Konstruksi, Pengeluaran Perkapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*.
- Larionova, M. (2020). *The Challenges of Attaining the Millennium Development Goals (MDGs). International Organisations Research Journal*.
- Lestari Agusalam, T. N. (2023). Pembuktian empiris teori upah efisiensi di Indonesia . *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 121-135.
- Lingkungan, P. (2016). Tajuk rencanaKomentar Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs): Mengatasi Agenda yang Belum Selesai dan Memperkuat Pembangunan Berkelanjutan dan Kemitraan.
- M.Ayaz, C.-s. H. (2023). *Collateral damage? Welfare effects of the Ukraine war on Pakistan. World Development Sustainability*.
- M.Syahirul, A. A. (2024). *Short-term Gini coefficient estimation using nonlinear autoregressive multilayer perceptron model. Heliyon*.
- Mardiatmoko, G. (2020). Pentingnya Uji Asumsi Klasik pada analisis Regresi Linier Berekang. G: *Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan*, 333-342.
- Marta Desna Fitria Br. Lumban Gaol, s. (2023). Determinan Status Kerawanan Pangan Rumah Tangga di Nusa Tenggara Timur 2021. *Politeknik Statistika STIS*.
- Muhammad Arif, R. A. (2017). Ketimpangan Pendapatan Propinsi Jawa Timur dan Faktor. *The 6th University Research Colloquium 2017* , 323-328.
- Murwiati, A. (2020). *The Economics and Spatial Analysis on How the Cash* .
- Nathasa Weisdania Sihite, I. T. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan rumah tangga di Kota Medan. *Aceh Nutrition Journal*.
- Rahmiyatin Nisa, M. T. (2024). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan di Indonesia. *Media Riset Ekonomi Pembangunan (MedREP)*, 84-91.
- Rifki Khoirudin, J. L. (2020). Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta . *Tirtayasa Ekonomika*, 17-30.
- S.Ihsani. (2022). Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan di Indonesia: Kasus Kebijakan Sentralisasi, Desentralisasi, dan Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi-Qu*.
- S.Rustariyuni. (2014).Pengaruh Gini Ratio,Pengeluaran non Makanan Per Kapita,Belanja Daerah dan laju pertumbuhan ekonomi pada Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Provinsi Bali tahun 2004-2021, Piramida

- Safina Allyanisa Hidayat, R. H. (n.d.). Pengaruh Inflasi, Upah Minimum dan Jumlah Penerima BLT terhadap Pengeluaran Konsumsi Perkapita di 7 Kota Jawa Barat tahun 2018-2023. Bandung Conference Series: Economics Studies , 190-197.
- Siti Fatimah Nurhayati, D. R. (2021). Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Desa Pandeyan Dan Desa Parangjoro Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo. The 13th University Research Colloquium.
- Siti Maisarah¹*, A. R. (2021). Pembangunan Berkelanjutan di era Pandemi: Program Pemulihan Perekonomian Berbasis Metadata Indikator SD. Jurnal Indonesia Sosial Sains.
- Subarna, T. (2012). Analisis Kemiskinan dan Pengeluaran non Pangan. Peneliti Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Barat, 243-250.
- Susi Susanti Angkat, S. (2023). Pengaruh Indeks Gini Rasio, Indeks Kemahalan Konstruksi, Pengeluaran Perkapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Jurnal Ekonomi Regional Unimal, 13-21.
- Tapparan, S. R. (2017). Pengaruh Upah Minimum dan Investasi terhadap Kesempatan Kerja di Provinsi Sulawesi Selatan. Jurnal Administrare: Jurnal Pemikiran Ilmiah dan Pendidikan Administrasi Perkantoran.
- Wuryandari, R. D. (2015). Faktor-faktor yang memengaruhi Pengeluaran Makanan, Pendidikan, dan Kesehatan Rumah Tangga Indonesia . Jurnal Kependudukan Indonesia | Vol. 10 No. 1 Juni 2015 , 27-42.